



Indeks Akses Keuangan Daerah

Policy Brief

Indeks Akses Keuangan Daerah

Policy Brief

Pengarah:

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tim Penyusun:

Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Direktorat Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan

Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional

RISE Indonesia (Sentra Riset Inovasi Edukasi)

Kata Pengantar

Policy Brief "**Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)**" ini disusun sebagai upaya menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi akses keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Indeks ini lahir dari semangat kolaboratif untuk mendorong layanan keuangan yang lebih merata dan digunakan secara luas, khususnya melalui peran aktif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kami meyakini penguatan akses keuangan yang inklusif adalah salah satu kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IKAD diharapkan menjadi jembatan antara data dan kebijakan untuk mendukung implementasi Asta Cita pemerintah.

Penyusunan IKAD ini terwujud berkat kolaborasi erat dan kontribusi berharga dari berbagai lembaga. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mitra riset dari akademisi dan lembaga kajian yang telah bahu-membahu dalam merumuskan indeks ini.

Besar harapan kami, IKAD dapat menjadi instrumen efektif bagi seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam mengakselerasi inklusi keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Tim Penyusun

Daftar Isi

01 I. PENDAHULUAN

- 02 I.1. Latar Belakang
- 02 I.1.1. Inklusi Keuangan di Indonesia
- 03 I.1.2. TPAKD sebagai Penggerak Utama Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah
- 03 I.1.3. Indeks Akses Keuangan Daerah
- 04 I.2. Kajian Literatur
- 04 I.2.1. Indikator Inklusi Keuangan
- 04 I.2.2. Indeks Komposit

05 II. DATA & METODOLOGI

- 06 II.1. Kerangka Konseptual dan Identifikasi Indikator
- 06 II.2. Pengolahan/Kompilasi Data
- 06 II.3. Penetapan Bobot Indikator dalam Penyusunan Indeks
- 07 II.4. Agregasi
- 07 II.5. Kategorisasi Indikator dan Indeks Komposit

09 III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 10 III.1. Kategorisasi Dimensi IKAD Berdasarkan Wilayah Kabupaten dan Kota
- 10 III.1.1. Dimensi Penggunaan
- 10 III.1.2. Dimensi Ketersediaan
- 11 III.1.3. Dimensi Kedalaman
- 11 III.2. Kategorisasi Dimensi IKAD Berdasarkan Wilayah TPAKD
- 11 III.2.1. Dimensi Penggunaan
- 11 III.2.2. Dimensi Ketersediaan
- 11 III.2.3. Dimensi Kedalaman
- 12 III.3. Sebaran Skor Indeks Dimensi dan Kategorisasi Indeks Komposit
- 13 III.4. Sebaran Kategorisasi Indeks Komposit Berdasarkan Wilayah TPAKD
- 14 III.5. Hubungan dengan indeks lain yang relevan

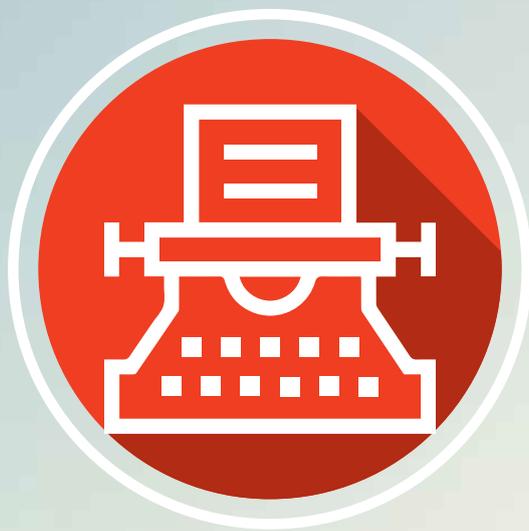
15 IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN

- 16 IV.1. Ringkasan
- 16 IV.2. Rekomendasi Kebijakan Implementasi IKAD
- 16 IV.2.1. Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dengan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di tingkat Kabupaten/Kota
- 17 IV.2.2. Kerangka Intervensi Kebijakan Berbasis Indikator IKAD
- 23 IV.2.3. Mendorong Peningkatan Akses Keuangan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
- 23 IV.2.4. Penyelarasan Kebijakan Inklusi Keuangan dengan Asta Cita untuk Pembangunan Ekonomi Pancasila
- 24 IV.3. Rekomendasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Berdasarkan Wilayah
- 24 IV.3.1. Rekomendasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Kota dan Kabupaten
- 24 IV.3.2. Rekomendasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
- 25 IV.3.3. Rekomendasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Daerah Kepulauan

27 RUJUKAN

31 LAMPIRAN

- 32 **Lampiran 1.**
Batas-batas yang ditetapkan untuk kategorisasi masing-masing indikator penyusun indeks IKAD
- 33 **Lampiran 2.**
Visualisasi Hasil Perhitungan Indikator IKAD
Sebaran Indikator Pada Dimensi Penggunaan
Sebaran Indikator Pada Dimensi Ketersediaan
Sebaran Indikator Pada Dimensi Kedalaman
- 36 **Lampiran 3.**
Penjelasan Indikator
- 40 **Lampiran 4.**
Komparasi Indikator Inklusi Keuangan



Pendahuluan

I. Pendahuluan



I.1. Latar Belakang

I.1.1. Inklusi Keuangan di Indonesia

Melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target inklusi keuangan nasional sebesar 98% di 2045. Inklusi keuangan ditekankan menjadi bagian penting dari Arah Pembangunan Stabilitas Ekonomi Makro yang diharapkan dapat mendukung optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Penjabaran lebih lanjut dijelaskan di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045. Di dalamnya inklusi keuangan ditetapkan menjadi indikator dalam salah satu Sasaran Utama Prioritas Nasional, dengan target tercapai 91% di tahun 2025 dan 93% di tahun 2029.

Inklusi keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Nandi et al., 2022) melalui peningkatan partisipasi seluruh masyarakat ke dalam sektor keuangan seperti perbankan, kredit, dan asuransi (Muschert et al., 2024; Misra, 2017) hingga mendorong pertumbuhan kewirausahaan, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja (Ferrata, 2019; Bhatnagar & Pathak; 2023). Baik Nandi et al. (2022) dan Hidayat & Sari (2022) sependapat bahwa ketersediaan akses dan penggunaan layanan keuangan merupakan faktor krusial dalam inklusi keuangan dan berdampak terhadap *outcome* perekonomian, dimana provinsi yang memiliki akses kepada layanan keuangan yang lebih baik memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, upaya peningkatan inklusi keuangan perlu dilakukan secara intensif dan ekstensif hingga ke tingkat daerah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan sektor keuangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui berbagai inovasi, upaya, dan inisiatif strategi inklusi keuangan. Berbagai tantangan dari berbagai kondisi latar belakang suku, adat, dan pendidikan yang beragam memberikan sinyal bagi seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam mendukung perluasan akses keuangan yang inklusif dan merata. Untuk mendukung komitmen dan upaya tersebut, diperlukan ukuran yang dapat memetakan kondisi inklusi keuangan di tingkat kabupaten/kota.



I.1.2. TPAKD sebagai Penggerak Utama Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah

Pada tingkat daerah, inisiatif peningkatan inklusi keuangan dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* untuk pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di daerah yang berperan mendorong target inklusi keuangan. Inisiasi pembentukan TPAKD berawal dari hasil pertemuan Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja, Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, dan termasuk seluruh Kepala Daerah tanggal 15 Januari 2016 di Istana Negara.

Saat ini telah terbentuk 552 TPAKD, yang terdiri dari 38 TPAKD Provinsi dan 514 TPAKD Kabupaten/Kota.

TPAKD telah menjalankan perannya dengan menyusun berbagai program kerja yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan berfokus pada kepemilikan dan penggunaan produk/layanan keuangan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan literasi keuangan. Pertanyaan yang muncul dengan adanya berbagai inovasi dan upaya dari berbagai pihak adalah “bagaimana melakukan evaluasi kebijakan melalui mekanisme monitoring yang *robust*, efisien, dan mudah digunakan pada suatu wilayah?”.

I.1.3. Indeks Akses Keuangan Daerah

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan TPAKD dan disparitas inklusi keuangan antar daerah, diperlukan sistem pemantauan yang kuat, efisien, dan mudah digunakan. Pemantauan yang tepat akan memastikan pelaksanaan strategi dapat terus diperbaiki, program dapat berjalan secara berkesinambungan, serta pencapaian target dan kualitas pelaksanaan tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan metode pemantauan dan evaluasi yang terukur, objektif, berbasis data yang kredibel, dan juga mampu mengidentifikasi disparitas antar wilayah.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, salah satu metode pengukuran yang dapat diterapkan adalah indeks komposit, yaitu suatu indikator gabungan yang terdiri dari indikator-indikator tunggal yang dikombinasikan menjadi sebuah indeks. Idealnya, indeks komposit mampu mengukur konsep multidimensi dan kompleks serta dapat mencakup banyak aspek yang tidak dapat ditangkap oleh satu indikator atau indeks tunggal. Hal tersebut dapat lebih mudah diinterpretasikan dan dipahami oleh masyarakat daripada menganalisis tren dari banyak indeks terpisah.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. Tujuan dari IKAD adalah sebagai berikut:

1. **Memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan di daerah berbasis data dan informasi yang komprehensif;**
2. **Memperkuat pemantauan kinerja dan efektivitas program TPAKD di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan memberi informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;**
3. **Melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), memperluas cakupan, serta memberikan potret kondisi inklusi keuangan yang lebih mendalam.**

IKAD berfungsi sebagai alat pemantauan untuk menganalisis capaian program inklusi keuangan TPAKD serta sebagai masukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Interpretasi penggunaannya mencakup:

1. **Peringkat dan Nilai Agregat.** IKAD menyajikan peringkat atau nilai agregat yang mencerminkan pencapaian program inklusi keuangan di berbagai daerah. Interpretasi dapat dilakukan melalui:
 - **Nilai Absolut:** Daerah dengan skor lebih tinggi menunjukkan capaian yang lebih baik.
 - **Kategorisasi Kinerja:** Capaian program inklusi keuangan diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu **1-Dasar, 2-Mulai Berkembang, 3-Berkembang, 4-Hampir Unggul, dan 5-Unggul.**
2. **Analisis Perbandingan.** IKAD memungkinkan perbandingan capaian antar daerah, analisis tren perkembangan program di setiap daerah maupun nasional, serta identifikasi pola pencapaian di berbagai wilayah.

3. Masukan bagi Kebijakan. Sebagai masukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif yang didasarkan pada data dan praktik baik dari daerah lain.

4. Evaluasi Keberhasilan Program. Berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan program serta mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

I.2. Kajian Literatur

Dalam rangka mengembangkan, telah dilaksanakan penelaahan literatur yang komprehensif. Penelaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator-indikator inklusi keuangan yang relevan dan memahami metodologi penyusunan indeks komposit.

I.2.1. Indikator Inklusi Keuangan

Berbagai negara telah mengklasifikasikan indikator pengukuran inklusi keuangan menjadi beberapa dimensi, seperti penggunaan dan akses/jangkauan (Sarma, 2024; Ravikumar, 2020), hingga dimensi kedalaman keuangan (Shapoval et al., 2021). Indikator merupakan penjabaran dari setiap dimensi dan digunakan sebagai masukan maupun penilaian bagi kondisi inklusi keuangan di masing-masing daerah, termasuk untuk menentukan jenis intervensi yang dibutuhkan. Meskipun demikian, dampak dari inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi setiap daerah dapat bervariasi, bergantung kepada tingkat pengembangan sektor keuangan dan faktor sosio-ekonomi lainnya (Siddiki & Bala-Keffi, 2024; Azimi, 2022). (Tabulasi dan penjelasan indikator pengukuran inklusi keuangan berdasarkan studi yang relevan beserta negara maupun lembaga internasional yang menggunakan terdapat pada lampiran 3).

I.2.2. Indeks Komposit

Indeks komposit adalah gabungan beberapa indikator tunggal sehingga bisa mencakup banyak aspek yang tidak dapat ditangkap oleh satu indikator/indeks tunggal. Indeks komposit lebih mudah diinterpretasikan dan dipahami dan dibandingkan dengan mengidentifikasi tren umum di berbagai indeks terpisah.

Pengertian indeks komposit menurut OECD (2008)

“Sebuah indeks komposit dibentuk ketika indeks individual dikompilasi menjadi satu indeks (gabungan) berdasarkan model yang mendasarinya”. Beberapa contoh Indeks komposit di Indonesia diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Dalam penyusunan indeks komposit ini, metode Min-Max dapat digunakan untuk menormalisasi indikator dengan satuan yang berbeda dengan mengubahnya menjadi skala yang sama, di antara 0 – 1 (nol sampai dengan satu), sehingga memungkinkan melakukan penggabungan berbagai indikator menjadi 1 indeks (Pandey & Murugesan, 2025; Ghosh & Sahu, 2021). Dalam perhitungan capaian inklusi keuangan di tingkat daerah, metode ini juga mampu menyoroti disparitas regional yang signifikan dan mengidentifikasi daerah/area yang perlu diperbaiki, seperti yang telah dilakukan di India (Saha & Alam, 2022; Ghosh & Sahu, 2021), Pakistan (Mohey-Ud-Din & Ikram, 2023), hingga daerah Sub-Sahara Afrika/SSA (Jima & Makoni, 2023; Eshun & Kočenda, 2025).

Meskipun demikian, efektivitas metode Min-Max bergantung kepada kualitas dan ketersediaan data di setiap daerah. Data yang tidak konsisten maupun kosong dapat berpengaruh kepada akurasi dari indeks yang dibentuk (Saha & Adam, 2022; Jima & Makoni, 2023). Walaupun metode Min-Max bertujuan untuk menormalkan indikator, subjektivitas pada pemberian bobot di setiap dimensi dapat mempengaruhi nilai akhir dari indeks (Jima & Makoni, 2023; Mohey-Ud-Din & Ikram, 2023).

Dalam penyusunan IKAD, proses normalisasi dilakukan dengan Metode Min-Max melalui formula berikut ini:

$$Z_{lm} = \frac{(X_{lm} - \min(X_l))}{((X_l) - \min(X_l))}$$

dengan $l = 1, 2, \dots, 14$ dan $m = 1, 2, \dots, 514$.

Pada indikator tertentu yang memiliki nilai ekstrim (outlier), batas atas formula tersebut menggunakan persentil ke-95 dengan formula:

$$Z_{lm} = \min \left(1, \frac{(X_{lm} - \min(X_l))}{((X_{lm}) - \min(X_l))} \right)$$



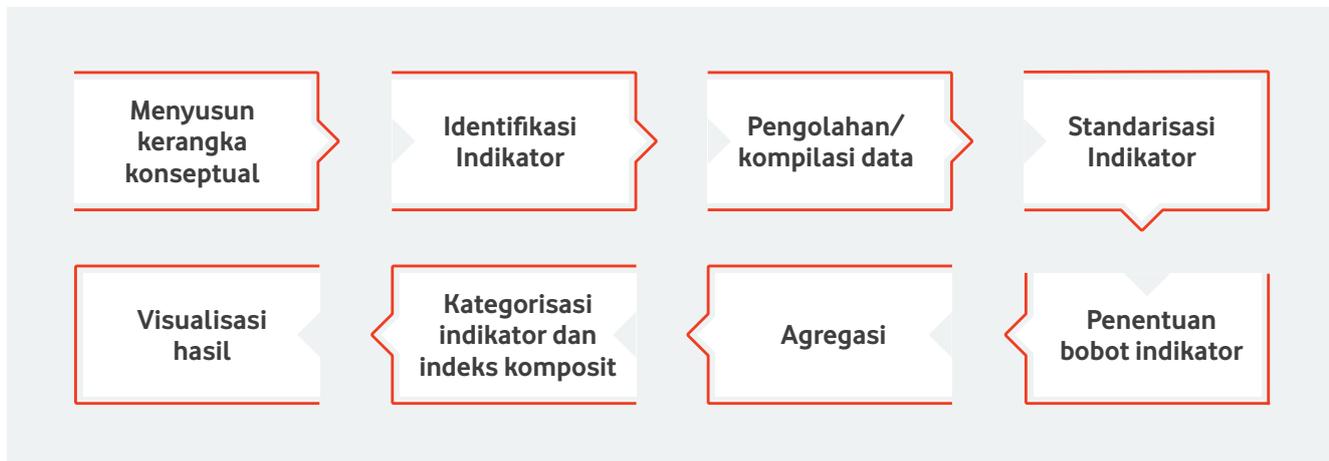
Data & Metodologi

II. Data & Metodologi



IKAD telah disusun dengan mengikuti standar penyusunan indeks dengan langkah sebagai berikut:

Gambar 1. Langkah-langkah penyusunan indeks komposit IKAD



II.1. Kerangka Konseptual dan Identifikasi Indikator

IKAD disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman. Dimensi penggunaan menilai sejauh mana penduduk dewasa di suatu wilayah dapat memanfaatkan layanan dan produk dari lembaga keuangan formal. Dimensi ketersediaan mengacu pada keberadaan layanan keuangan formal di suatu daerah. Sementara itu, dimensi kedalaman mengukur seberapa luas dan beragam layanan serta produk keuangan yang digunakan di suatu wilayah. Berdasarkan ketiga dimensi ini, berbagai indikator dikembangkan sebagai ukuran konkret dalam menilai tingkat inklusi keuangan. Penentuan indikator dalam setiap dimensi didasarkan pada ketersediaan data, penerapannya di negara atau lembaga internasional yang kredibel, serta keselarasan dengan program pemerintah atau kebijakan inklusi keuangan nasional. Adapun detail indikator yang digunakan terdapat dalam Tabel 1.

II.2. Pengolahan/Kompilasi Data

Kompilasi data dilakukan dengan mengacu pada unit wilayah dalam data BPS. Terdapat indikator yang tidak mencakup seluruh 514 kabupaten/kota dikarenakan adanya wilayah yang datanya kosong. Untuk wilayah

dengan kekosongan data tersebut, umumnya dilakukan imputasi melalui pemberian nilai 0 (nol) berdasarkan asumsi bahwa wilayah tersebut tidak memiliki nilai yang sesuai dengan indikator terkait.

Selain itu, terdapat suatu indikator yang menggunakan metode imputasi yang berbeda dikarenakan datanya hanya mencakup 478 wilayah, terdiri dari 442 kabupaten serta 26 wilayah gabungan kabupaten dan kota yang memiliki nama yang sama dalam sumber data (misalnya, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang tercatat sebagai "Bogor"). Untuk 26 wilayah ini, data diperkirakan menggunakan Regresi Poisson berdasarkan data dari 442 kabupaten/kota lainnya. Regresi Poisson dipilih karena data merupakan data cacahan (*count data*) sehingga akan kurang sesuai jika menggunakan model regresi linier yang berbasis distribusi normal.

II.3. Penetapan Bobot Indikator dalam Penyusunan Indeks

Penetapan bobot indikator dilakukan berdasarkan pertimbangan pakar (*expert judgement*) dengan memperhitungkan kontribusi dari setiap aspek/dimensi dalam pembentukan indeks komposit serta peran masing-masing indikator di dalam dimensinya. Tabel 1 berikut ini menyajikan rincian dimensi, indikator terkait, bobot yang ditetapkan, serta sumber data dari masing-masing indikator.

Tabel 1. Dimensi, indikator-indikator turunannya, bobot serta sumber data indikator pada penyusunan indeks IKAD. Keterangan: jumlah penduduk dewasa, jumlah penduduk berpenghasilan rendah serta PDRB diperoleh dari BPS.

| No | Dimensi | Kategori | Label | Indikator | Bobot | Sumber data |
|----|--------------|------------------|---|---|-------|-------------|
| 1 | Penggunaan | Kepemilikan akun | REK3 | Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 0.1 | OJK |
| 2 | | | TABUNGAN | Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 0.15 | Susenas |
| 3 | | | EWALLET | Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 0.1 | BI |
| 4 | | Pinjaman | REKPINJAMAN_UMKM | Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman | 0.13 | OJK |
| 5 | | | REKPINJAMAN_IND | Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 0.05 | OJK |
| 6 | | | UMKM_PEREMPUAN | Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total | 0.07 | OJK |
| 7 | | Asuransi | POLIS | Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 0.07 | OJK |
| 8 | | | BPJS_PBI | Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah | 0.012 | Susenas |
| 9 | | | BPJS_MANDIRI | Jumlah pemilik BPJS Mandiri/Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah | 0.018 | Susenas |
| 10 | Ketersediaan | ATM | Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa | 0.05 | OJK | |
| 11 | | AGEN | Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa | 0.08 | OJK | |
| 12 | | QRIS | Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa | 0.07 | BI | |
| 13 | Kedalaman | DPK | Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB | 0.05 | OJK | |
| 14 | | PINJAMAN_UMKM | Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman | 0.05 | OJK | |

II.4. Agregasi

Penyusunan indeks komposit IKAD dilakukan melalui metode agregasi linier dengan rumus sebagai berikut:

$$IKAD_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$$

Di mana a_l merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala. Seluruh 14 indikator dalam IKAD memiliki interpretasi yang sama, yaitu semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kondisi

akses keuangan daerah. Oleh karena itu, tidak diperlukan konversi nilai untuk indikator dengan arah pemaknaan yang berbeda. Pengali 10 dalam rumus agregasi digunakan untuk memastikan bahwa skala indeks IKAD berada dalam rentang 0 hingga 10.

II.5. Kategorisasi Indikator dan Indeks Komposit

Setelah nilai indeks komposit diperoleh, selanjutnya dilakukan interpretasi kualitatif untuk menilai kondisi akses keuangan di suatu daerah. Dalam penyusunan

IKAD, interpretasi dilakukan melalui kategorisasi indeks komposit ke dalam lima tingkat, yaitu: 1-Dasar, 2-Mulai Berkembang, 3-Berkembang, 4-Hampir Unggul, dan 5-Unggul. Kategorisasi ini ditentukan dengan menetapkan empat batas pada indeks komposit.

Kategorisasi Indeks IKAD (tingkat Dasar hingga Unggul) merupakan agregasi dari kategorisasi masing-masing indikator penyusunnya, seperti halnya Indeks Komposit IKAD yang merupakan agregasi dari berbagai indikator. Penentuan lima kategori ini didasarkan pada asumsi bahwa rata-rata atau median nilai indikator berada di kategori tingkat ke-3 (Berkembang). Batas ke-2 dan ke-3 (dua batas yang mengapit kategori 3) ditetapkan sedemikian

rupa sehingga rata-rata atau media berada pada selang ini, sementara dua batas lainnya ditentukan setelah itu. Berikut ini formula agregasi batas indeks komposit berdasarkan batas seluruh indikator:

$$C_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l C_q^l \right) \times 10$$

dengan: $q = 1, 2, 3, 4$; C_q adalah batas kategorisasi ke- q indeks IKAD, dan C_q^l adalah batas kategorisasi ke- q indikator ke- l . Data penetapan 4 batas kategorisasi untuk masing-masing indikator terdapat pada Lampiran 1.



Hasil dan Pembahasan

III. Hasil dan Pembahasan



Merujuk pada formulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian ini menyajikan hasil perhitungan yang diperoleh dari data tahun 2022.

III. 1. Kategorisasi Dimensi IKAD Berdasarkan Wilayah Kabupaten dan Kota

Selanjutnya, bagian ini menyajikan hasil kategorisasi untuk wilayah Kabupaten dan Kota berdasarkan tiga dimensi akses keuangan yang telah didefinisikan.

III.1.1. Dimensi Penggunaan

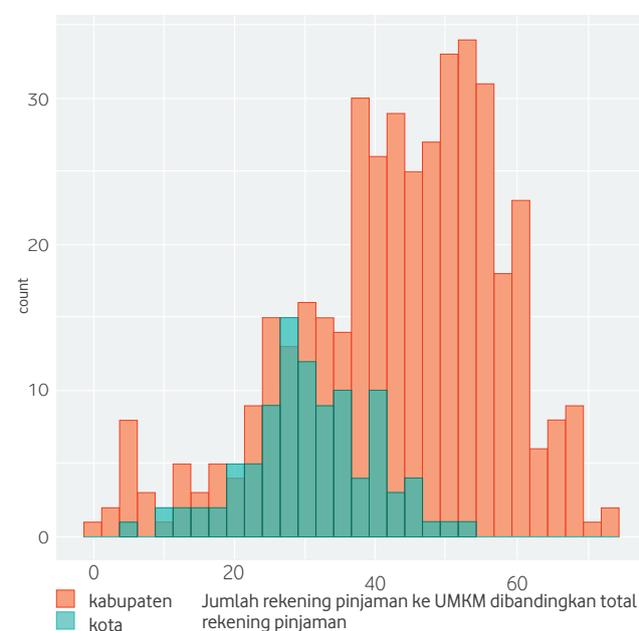
Tabel 2 di bawah ini menyajikan sebaran kategori untuk dimensi penggunaan di wilayah kabupaten dan kota. Secara umum, wilayah kota telah mencapai tingkat penggunaan layanan keuangan yang lebih tinggi dibanding wilayah kabupaten, di mana sebagian besar (82,6%) wilayah kota berada pada kategori 5 (Unggul). Baru sebesar 3,4% wilayah kabupaten yang termasuk dalam kategori 5, sedangkan sebagian besar (77,4%) masih berada di kategori 1 (Dasar) hingga 3 (Berkembang).

Tabel 2. Dimensi Penggunaan Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota

| Kategori | Kab | Kota | Total |
|----------|-----|------|-------|
| 1 | 22 | - | 22 |
| 2 | 99 | 3 | 102 |
| 3 | 201 | 3 | 204 |
| 4 | 80 | 11 | 91 |
| 5 | 14 | 81 | 95 |
| Total | 416 | 98 | 514 |

Hal tersebut menandakan masih terbuka peluang pengembangan dan perluasan penggunaan layanan keuangan di kawasan kabupaten, tentu dengan memperhatikan faktor pendukung lainnya. Namun, untuk indikator kredit/pembiayaan UMKM (REKPINJAMAN_UMKM), wilayah kabupaten memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota. Untuk indikator jumlah polis asuransi (POLIS), tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara wilayah kota dan kabupaten.

Gambar 2. Sebaran indikator REKPINJAMAN_UMKM



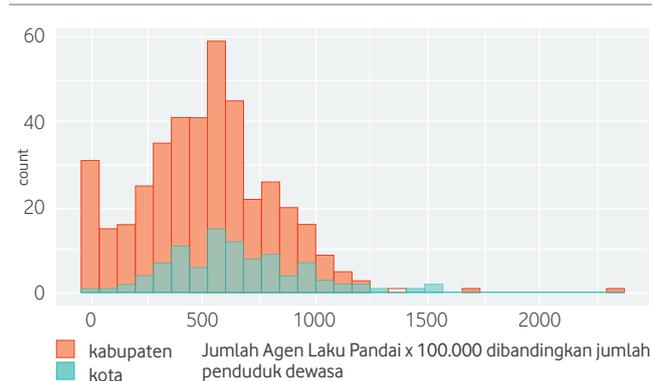
III.1.2 Dimensi Ketersediaan

Tabel 3 di bawah ini menunjukkan sebaran kategori untuk dimensi ketersediaan di wilayah kabupaten dan kota. Secara umum, wilayah kota menunjukkan bahwa 89,8% wilayah kota berada pada kategori 4 (Hampir Unggul) dan 5 (Unggul), yang didominasi oleh indikator ketersediaan ATM (ATM) dan merchant QRIS (QRIS). Sedangkan 71,2% wilayah kabupaten masih berada di kategori 1 (Dasar) hingga 3 (Berkembang) untuk dimensi ketersediaan. Namun, keberadaan agen Laku Pandai (AGEN) di wilayah kabupaten dan kota relatif tidak berbeda.

Tabel 3. Dimensi Ketersediaan Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota

| Kategori | Kab | Kota | Total |
|----------|-----|------|-------|
| 1 | 127 | 3 | 130 |
| 2 | 87 | 4 | 91 |
| 3 | 82 | 3 | 85 |
| 4 | 71 | 9 | 80 |
| 5 | 49 | 79 | 128 |
| Total | 416 | 98 | 514 |

Gambar 3. Sebaran indikator AGEN



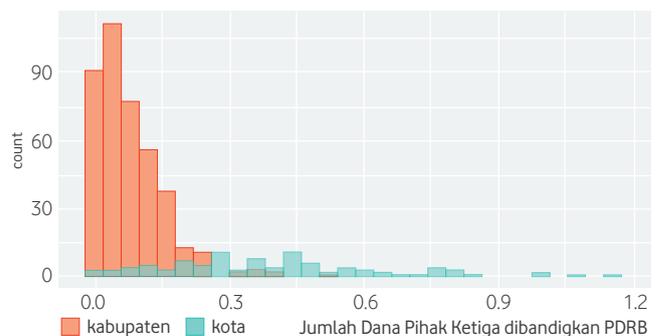
III.1.3 Dimensi Kedalaman

Dimensi kedalaman yang ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah kota berada pada kategori yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal tersebut didukung oleh indikator jumlah dana pihak ketiga dibandingkan dengan PDRB (DPK) wilayah kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Namun, hal sebaliknya terjadi pada indikator Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman (PINJAMAN_UMKM) di mana wilayah kabupaten lebih tinggi daripada kota, sejalan dengan hasil indikator pada dimensi penggunaan.

Tabel 4. Dimensi Kedalaman Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota

| Kategori | Kab | Kota | Total |
|----------|-----|------|-------|
| 1 | 83 | 3 | 86 |
| 2 | 79 | 6 | 85 |
| 3 | 108 | 13 | 121 |
| 4 | 74 | 8 | 82 |
| 5 | 72 | 68 | 140 |
| Total | 416 | 98 | 514 |

Gambar 3. Sebaran indikator DPK



III.2. Kategorisasi Dimensi IKAD Berdasarkan Wilayah TPAKD

Kategorisasi dimensi IKAD juga telah dilakukan berdasarkan wilayah TPAKD (Barat, Tengah dan Timur) seperti yang dijelaskan dalam bagian berikut:

III.2.1 Dimensi Penggunaan

Tabel 5 di bawah ini menunjukkan bahwa secara umum, mayoritas (63,8%) wilayah TPAKD masih berada pada kategori 1 (Dasar) hingga 3 (Berkembang) pada dimensi penggunaan, yang masih didominasi oleh wilayah TPAKD bagian barat dan timur. Sedangkan, hampir setengah (49,5%) dari wilayah TPAKD yang termasuk pada kategori 4 (Hampir Unggul) dan 5 (Unggul) berada pada wilayah TPAKD bagian tengah, sementara selebihnya cenderung terbagi merata di TPAKD wilayah barat dan timur.

Tabel 5. Dimensi Penggunaan Berdasarkan Wilayah TPAKD

| Kategori | Barat | Tengah | Timur | Total |
|----------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | 3 | | 19 | 22 |
| 2 | 36 | 21 | 45 | 102 |
| 3 | 70 | 62 | 72 | 204 |
| 4 | 19 | 41 | 31 | 91 |
| 5 | 26 | 51 | 18 | 95 |
| Total | 154 | 175 | 185 | 514 |

III.2.2 Dimensi Ketersediaan

Tabel 6 di bawah ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan perbaikan pada dimensi ketersediaan di hampir setiap wilayah TPAKD. Untuk kategori 1 (Dasar) hingga 3 (Berkembang) pada dimensi ketersediaan, jumlah daerah di wilayah barat mencapai 60,4%, wilayah tengah sebesar 50,3%, dan wilayah timur sebesar 67,57%. Untuk kategori 4 (Hampir Unggul) dan 5 (Unggul), 41,8% berada di TPAKD wilayah tengah, sedangkan selebihnya terbagi merata untuk wilayah barat dan timur. Hal tersebut mengindikasikan

urgensi untuk mendorong perluasan penyediaan akses layanan keuangan, terutama di wilayah Luar Jawa.

Tabel 6. Dimensi Ketersediaan Berdasarkan Wilayah TPAKD

| Kategori | Barat | Tengah | Timur | Total |
|----------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | 41 | 19 | 70 | 130 |
| 2 | 26 | 36 | 29 | 91 |
| 3 | 26 | 33 | 26 | 85 |
| 4 | 25 | 29 | 26 | 80 |
| 5 | 36 | 58 | 34 | 128 |
| Total | 154 | 175 | 185 | 514 |

III.2.3 Dimensi Kedalaman

Tabel 7 di bawah ini menunjukkan hasil indikator pada dimensi kedalaman cenderung merata untuk setiap kategori di setiap wilayah, kecuali untuk kategori 5 (Unggul) yang mayoritas berada di wilayah tengah. Baik di TPAKD wilayah barat, tengah, dan timur perlu mendorong peningkatan jumlah DPK, termasuk mendorong pemberdayaan UMKM diantaranya melalui penyaluran pinjaman.

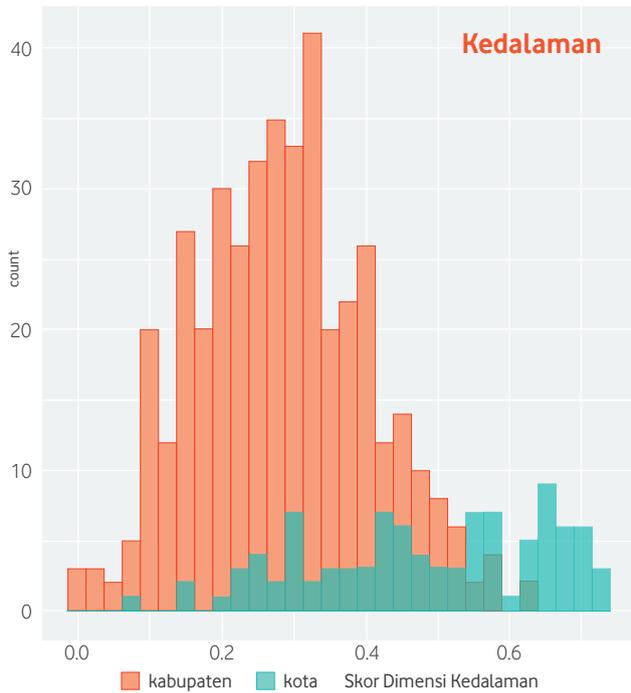
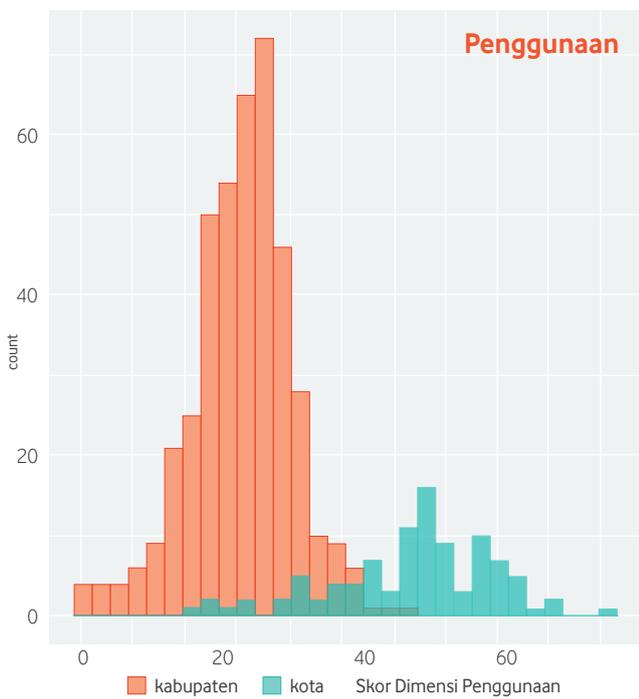
Tabel 7. Dimensi Kedalaman Berdasarkan Wilayah TPAKD

| Kategori | Barat | Tengah | Timur | Total |
|----------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | 15 | 15 | 56 | 86 |
| 2 | 30 | 28 | 27 | 85 |
| 3 | 44 | 36 | 41 | 121 |
| 4 | 29 | 28 | 25 | 82 |
| 5 | 36 | 68 | 36 | 140 |
| Total | 154 | 175 | 185 | 514 |

III.3. Sebaran Skor Indeks Dimensi dan Kategorisasi Indeks Komposit

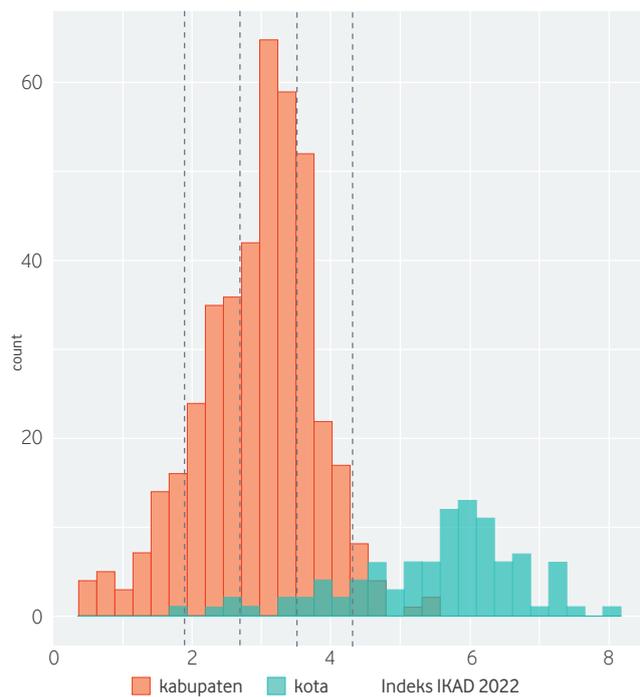
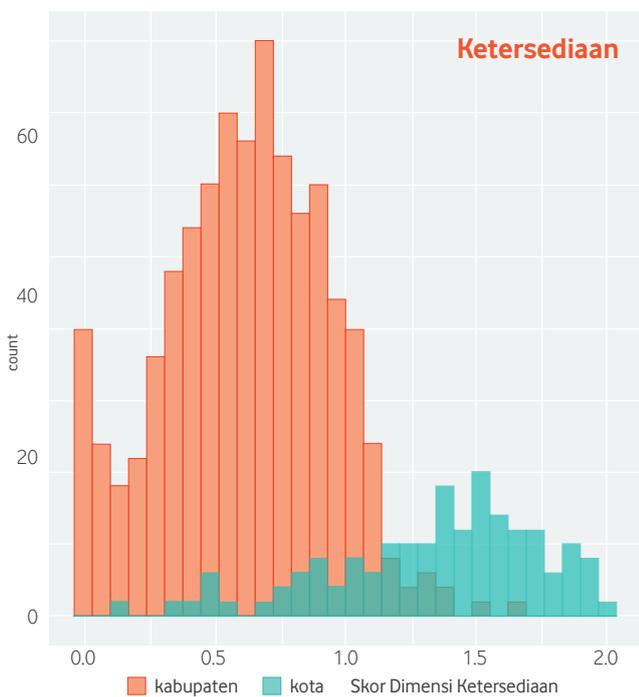
Gambar 5 menyajikan sebaran skor untuk tiga dimensi IKAD, yaitu penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman. Secara keseluruhan, wilayah kota memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Temuan ini memperkuat hasil eksplorasi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa hampir semua indikator memiliki nilai lebih tinggi di wilayah kota dibandingkan di kabupaten.

Gambar 5. Sebaran skor masing-masing dimensi penyusun IKAD 2022



Gambar 6 di bawah ini menampilkan sebaran Indeks Komposit IKAD 2022, yang dilengkapi dengan 4 titik batas yang membagi indeks komposit menjadi 5 kategori. Hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa skor di wilayah kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten.

Gambar 6. Sebaran indeks IKAD 2022 beserta 4 titik batas untuk kategorisasi menjadi 5 kategori



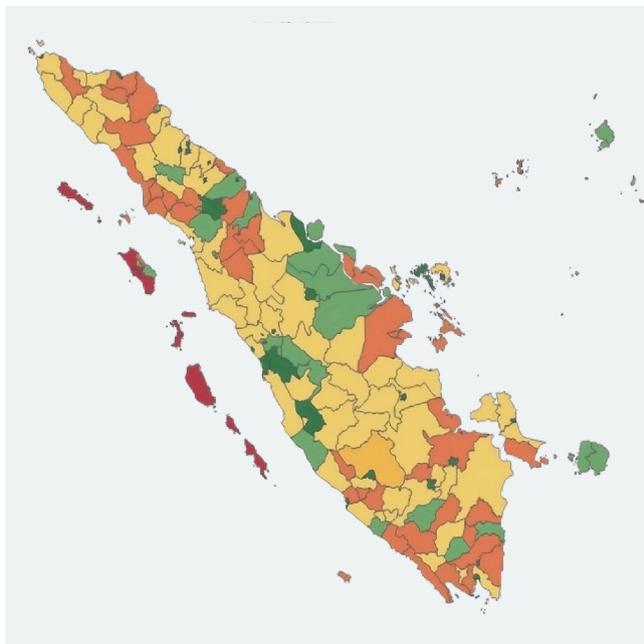
III.4. Sebaran Kategorisasi Indeks Komposit Berdasarkan Wilayah TPAKD

Mayoritas kabupaten/kota di wilayah barat (100 dari 154) berada pada kategori berkembang hingga unggul (kategori 3 sampai 5), yaitu 60 wilayah berada pada kategori 3 sementara sisanya termasuk dalam kategori 4 atau 5. Di wilayah tengah, sebagian besar kabupaten/kota (92 dari 175) masuk ke dalam kategori 4 hingga 5, hanya terdapat 25 yang termasuk ke dalam kategori 1 atau 2. Sementara itu, di wilayah timur hanya terdapat 49 (dari 185) kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori 4 atau 5, dengan 78 daerah lainnya masuk ke dalam kategori 1 atau 2.

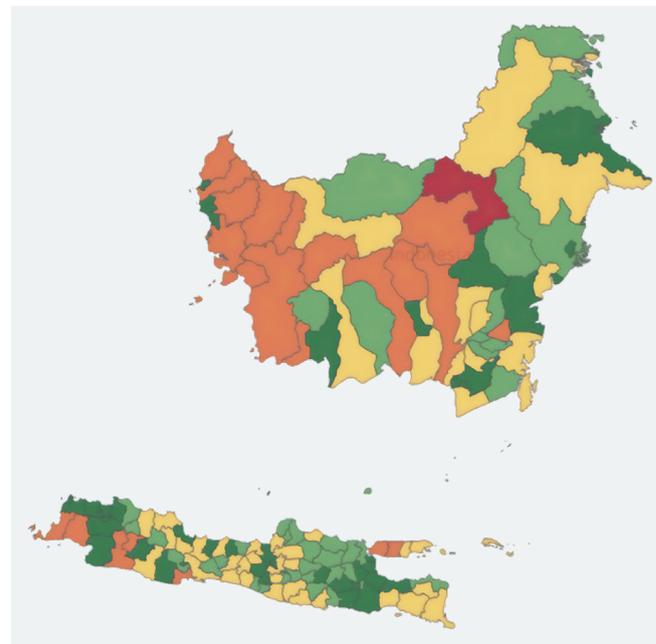
Tabel 8. Hasil kategorisasi indeks IKAD 2022 berdasarkan wilayah TPAKD

| Kategori | Barat | Tengah | Timur |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 | 5 | 1 | 40 |
| 2 | 39 | 24 | 38 |
| 3 | 60 | 58 | 58 |
| 4 | 22 | 42 | 30 |
| 5 | 28 | 50 | 19 |
| Total | 154 | 175 | 185 |

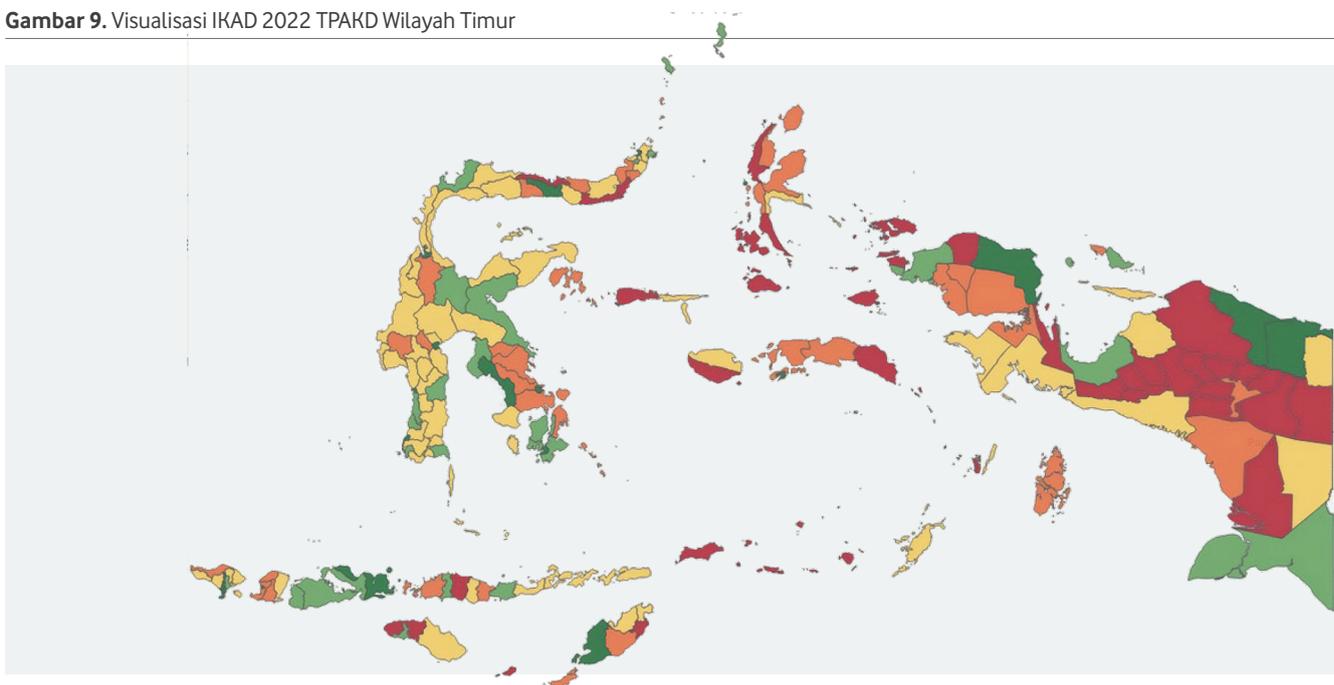
Gambar 7. Visualisasi IKAD 2022 TPAKD Wilayah Barat



Gambar 8. Visualisasi IKAD 2022 TPAKD Wilayah Tengah



Gambar 9. Visualisasi IKAD 2022 TPAKD Wilayah Timur



III. 5. Hubungan dengan indeks lain yang relevan

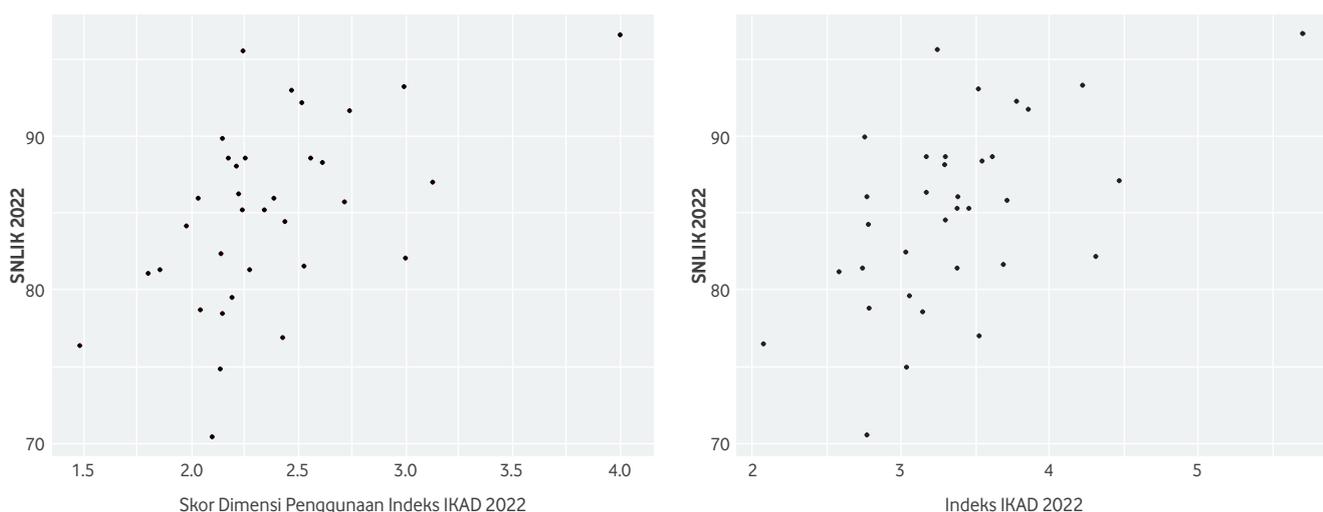
Untuk dapat menggambarkan keterkaitan antara Indeks IKAD dengan indeks lain yang relevan, bagian ini menyajikan hubungan antara Indeks IKAD 2022, indeks inklusi keuangan dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang diselenggarakan OJK, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022. Unit wilayah SNLIK 2022 berada pada level provinsi, sedangkan IPM 2022 pada level kabupaten/kota.

Analisis hubungan antara Indeks IKAD 2022 dan SNLIK 2022 dilakukan dengan menggunakan rata-rata terboboti Indeks IKAD pada tingkat provinsi. Rata-rata tingkat provinsi tersebut diperoleh dengan menggunakan rata-rata terboboti Indeks IKAD 2022 pada tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan pembobot berupa jumlah

penduduk dewasa di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, juga dilakukan perhitungan yang serupa untuk dimensi penggunaan IKAD 2022. Hal tersebut disebabkan karena definisi inklusi keuangan pada SNLIK 2022 selaras dengan dimensi penggunaan IKAD 2022.

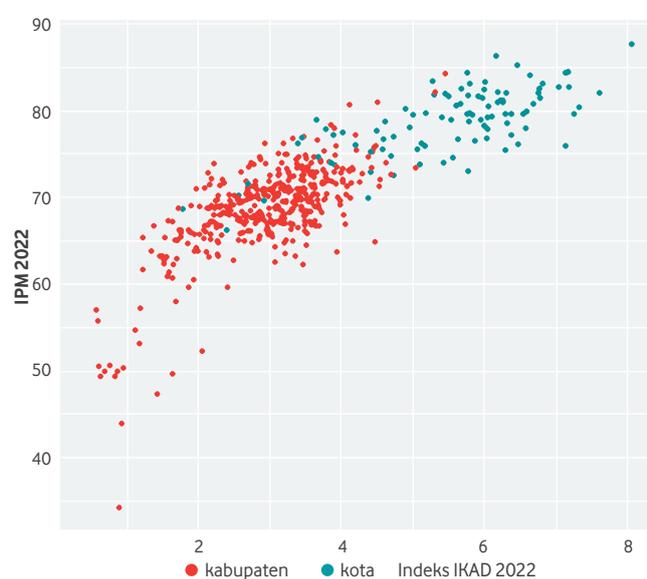
Gambar 10 di bawah ini menggambarkan adanya korelasi positif antara skor dimensi penggunaan dan Indeks Komposit IKAD 2022 dengan SNLIK 2022. Nilai korelasi Indeks Inklusi Keuangan SNLIK 2022 dengan kedua skor ini masing-masing sebesar 0.538 dan 0.547 untuk dimensi penggunaan dan Indeks Komposit IKAD 2022. Temuan ini mengindikasikan bahwa Indeks IKAD 2022 memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan Indeks Inklusi Keuangan SNLIK 2022.

Gambar 10. Plot antara indeks inklusi keuangan SNLIK 2022 dengan skor dimensi penggunaan dan skor indeks komposit IKAD 2022



Gambar 11 menampilkan hubungan antara IKAD 2022 dengan IPM 2022 yang menunjukkan adanya korelasi positif antara kedua indeks tersebut. Secara umum, skor untuk wilayah kota relatif lebih tinggi untuk IKAD 2022 maupun IPM 2022. Koefisien korelasi antara kedua indeks ini sebesar 0.817, menandakan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara akses keuangan daerah dan tingkat pembangunan manusia.

Gambar 11. Plot antara indeks IKAD2022 dengan IPM 2022





Rekomendasi Kebijakan

IV. Rekomendasi Kebijakan



IV.1. Ringkasan

Akses keuangan yang inklusif dan merata memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan sektor keuangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui berbagai inisiatif, termasuk penyusunan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Roadmap TPAKD, dan Peta Jalan PEPK. Namun, terdapat 3 (tiga) isu utama dalam penerapan inklusi keuangan di Indonesia, yaitu (1) terdapat kesenjangan/disparitas akses keuangan; (2) perlunya instrumen penilai efektivitas program TPAKD; serta (3) kebutuhan perangkat pengukuran akses keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan analisis geospasial. Pengentasan isu tersebut dilakukan antara lain melalui instrumen pengukuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).

Tujuan dan strategi pemanfaatan IKAD antara lain untuk: (1) Memperoleh data dan informasi yang komprehensif; (2) Meningkatkan efektivitas program TPAKD; (3) Mewujudkan akses keuangan inklusif; serta (4) Melakukan intervensi kebijakan di daerah rentan berbasis data. Adapun pemanfaatan IKAD antara lain untuk mengukur kesenjangan akses keuangan dengan berbagai kriteria, mengukur efektivitas program TPAKD, serta menganalisis faktor penyebab yang mempengaruhi akses keuangan daerah. Pengembangan IKAD merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses keuangan daerah di Indonesia. Dengan memanfaatkan data dan informasi IKAD secara optimal, diharapkan disparitas akses keuangan dapat diatasi dan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera.

Untuk dapat mendorong perumusan dan implementasi kebijakan strategis dalam mendorong inklusi keuangan, IKAD berperan sebagai katalisator untuk dapat mengakselerasi perwujudan akses keuangan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adapun kebijakan strategis yang dapat di akselerasi dengan penerapan IKAD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
4. Roadmap Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) 2023-2027;
5. Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); serta
6. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Adapun rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di daerah melalui implementasi IKAD adalah:

1. Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dengan Indeks Akses Keuangan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Kerangka Intervensi Kebijakan Berbasis Indikator IKAD;
3. Mendorong Peningkatan Akses Keuangan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Penyelarasan Kebijakan Inklusi Keuangan dengan Asta Cita untuk Pembangunan Ekonomi Pancasila.

IV.2. Rekomendasi Kebijakan Implementasi IKAD

IV.2.1 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dengan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di tingkat Kabupaten/Kota

Untuk memastikan keselarasan inklusi keuangan dengan arah kebijakan kewilayahan antara RPJPD dan RPJPN, program inklusi keuangan dan TPAKD memiliki peran strategis dalam mencapai target-target pembangunan daerah. Berbagai program kerja yang telah dimiliki oleh TPAKD merupakan bagian penting dalam mendorong indikator sektor keuangan dalam RPJPN dan RPJPD. Dengan demikian, rekomendasi langkah strategis yang

dapat diambil untuk terus mendorong sinergi antar lembaga untuk mendorong pencapaian program kerja inklusi keuangan yaitu:

- a. **Penyelarasan IKAD dalam RPJMD:** Mendorong integrasi dan penyelarasan IKAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- b. **Kajian Skenario dan Proyeksi: Melakukan kajian skenario dan proyeksi** IKAD untuk memperkirakan perkembangan akses keuangan daerah dan mengidentifikasi keperluan anggaran, serta potensinya dalam rangka penyusunan program inklusi keuangan bagi TPAKD.

IV.2.2 Kerangka Intervensi Kebijakan Berbasis Indikator IKAD

a. Dimensi Penggunaan

Intervensi berfokus pada peningkatan kepemilikan dan pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat. Intervensi tersebut juga harus didukung oleh (1) peningkatan literasi keuangan; (2) perluasan akses layanan keuangan; serta (3) pengembangan produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Literasi keuangan memberikan pengetahuan bagi masyarakat sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara efektif, sedangkan akses terhadap keuangan memastikan produk dan layanan keuangan dapat tersedia dan terjangkau oleh masyarakat (Fanta & Mutsonziwa, 2021; Grohmann et al., 2018; Ranabhat et al., 2023; Aparna & Anthuvan, 2022). Pengembangan produk keuangan juga harus menyesuaikan pada kebutuhan kelompok masyarakat rentan terhadap eksklusi keuangan seperti perempuan, masyarakat daerah perdesaan, hingga pelaku UMKM. Contoh aplikasi dalam dimensi penggunaan antara lain program edukasi dan sosialisasi keuangan melalui berbagai kanal, perluasan jaringan agen Laku Pandai hingga ke pelosok daerah, serta penyediaan produk tabungan yang terjangkau dan mudah diakses.

b. Dimensi Ketersediaan

Intervensi fokus pada perluasan jangkauan layanan keuangan, baik melalui infrastruktur fisik, digital, maupun kombinasi keduanya. Teknologi digital dapat mendorong layanan keuangan dapat lebih mudah diakses bahkan hingga pelosok, terjangkau dari sisi biaya, serta nyaman untuk digunakan oleh masyarakat (Rawat et al., 2023; Obiora & Ozili, 2023; Chu, 2018; Mhlanga, 2025; Grishanova et al., 2022; Chitimira & Warikandwa, 2023), termasuk menjembatani *gender gap* dengan meningkatkan penggunaan layanan keuangan di antara perempuan dan kelompok marginal lainnya (Mohd Daud et al., 2024). Aplikasi dimensi ketersediaan antara lain perluasan ketersediaan ATM, agen Laku Pandai, merchant QRIS, serta pengembangan layanan keuangan digital yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Peningkatan ketersediaan agen Laku Pandai dilengkapi dengan program pelatihan dan pendampingan calon agen, pemberian insentif, serta kerjasama dengan Pemda dalam pemetaan dan pengembangan jaringan agen di daerah-daerah yang belum terjangkau.

c. Dimensi Kedalaman

Intervensi dimensi kedalaman fokus pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan keuangan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap PDRB dan rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman, serta mendorong inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan kedalaman akses keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Penyaluran kredit/pinjaman kepada UMKM memiliki dampak vital dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan inovasi, termasuk peran mereka dalam PDB dan ekspor (Begum et al., 2024; Thangavel & Hariharan, 2015). Aplikasi dimensi kedalaman antara lain penyaluran kredit program (Kredit Usaha Rakyat atau KUR, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir atau K/PMR, dan Pembiayaan Ultra Mikro atau UMi) dan program pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM.

Tabel 9. Kerangka Intervensi Kebijakan Berbasis Indikator IKAD

Dimensi Penggunaan

| Indikator | Permasalahan | Upaya Penyelesaian Masalah | Program Inklusi Keuangan | Lembaga/Instansi Terkait | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1. Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa 2. Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa | Rendahnya kepemilikan rekening simpanan di daerah pedesaan dan daerah 3T | Peningkatan literasi keuangan di daerah pedesaan dan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) | <ul style="list-style-type: none"> □ Program <i>Basic Saving Account/</i> tabungan dasar untuk mendukung keuangan inklusif □ Program Satu Keluarga Satu Rekening atau Satu Rekening Satu Penduduk □ Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) di daerah pedesaan dan 3T | <ul style="list-style-type: none"> □ OJK □ Kementerian/ Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (K/L/D) yang menyelenggarakan urusan pendidikan □ Lembaga Jasa Keuangan (LJK) | |
| | | | Perluasan akses ke layanan keuangan formal | Pengembangan Agen Laku Pandai di daerah pedesaan dan 3T | <ul style="list-style-type: none"> □ OJK □ K/L/D yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat & daerah 3T □ LJK |
| | | | | Pengembangan dan perluasan layanan keuangan digital | <ul style="list-style-type: none"> □ OJK □ BI □ LJK |
| | Kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal akibat tidak memiliki identitas kependudukan | Memudahkan akses layanan keuangan formal melalui program kepemilikan identitas kependudukan digital | Program kepemilikan identitas kependudukan digital | □ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). | |
| 3. Jumlah rekening <i>e-wallet</i> dibandingkan jumlah penduduk dewasa | Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai <i>e-wallet</i> | Sosialisasi dan edukasi mengenai <i>e-wallet</i> | Program edukasi <i>e-wallet</i> | <ul style="list-style-type: none"> □ Bank Indonesia □ Lembaga Sistem Pembayaran (SP) | |
| | | | Pengembangan materi edukasi <i>e-wallet</i> | <ul style="list-style-type: none"> □ Bank Indonesia □ Lembaga SP | |
| | Kurangnya kepercayaan terhadap keamanan <i>e-wallet</i> | Penguatan perlindungan konsumen dan keamanan <i>e-wallet</i> Publikasi mengenai manfaat, kelebihan, dan keamanan <i>e-wallet</i> | Pengembangan perlindungan konsumen dan sistem keamanan <i>e-wallet</i> Publikasi dan promosi manfaat penggunaan <i>e-wallet</i> | <ul style="list-style-type: none"> □ Akademi □ Kementerian Komunikasi dan Digital | |

Dimensi Penggunaan

| Indikator | Permasalahan | Upaya Penyelesaian Masalah | Program Inklusi Keuangan | Lembaga/Instansi Terkait |
|--|---|---|--|--|
| 4. Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman | Rendahnya akses UMKM terhadap kredit/pembiayaan | Peningkatan literasi keuangan bagi UMKM | Sosialisasi produk/ layanan keuangan kredit/pembiayaan dan penyusunan materi keuangan bagi UMKM | <input type="checkbox"/> Komite Kebijakan KUR <input type="checkbox"/> Bank Indonesia <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah <input type="checkbox"/> Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan dan penyaluran kredit/pembiayaan <input type="checkbox"/> LJK <input type="checkbox"/> Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan <input type="checkbox"/> Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) |
| | | Penguatan program pembiayaan UMKM | <input type="checkbox"/> Program KUR <input type="checkbox"/> Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) <input type="checkbox"/> Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) | |
| | | Kebijakan kemudahan akses kredit/pembiayaan | Regulasi/kebijakan kemudahan akses kredit/pembiayaan kemudahan prosedur, subsidi suku bunga, insentif, rasio penyaluran kredit, atau jaminan kredit | |
| | | Optimalisasi interkoneksi sistem informasi perkreditan dan sistem terkait | | |
| 5. Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa | Tingginya risiko kredit/pembiayaan UMKM | Penguatan manajemen risiko kredit/pembiayaan UMKM | Program pendampingan UMKM | <input type="checkbox"/> K/L/D yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan UMKM <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> LJK <input type="checkbox"/> Akademisi |
| | | Penguatan kapasitas dan manajemen risiko kredit UMKM | Program pendampingan pencatatan informasi keuangan bagi UMKM | |
| 5. Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa | Rendahnya akses masyarakat terhadap kredit/pembiayaan | Edukasi mengenai produk kredit/pembiayaan | Program edukasi kredit/pembiayaan | <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> LJK |
| | | Peningkatan akses ke layanan kredit/pembiayaan | Pengembangan layanan kredit/pembiayaan digital | |
| | <i>Over-indebtedness</i> (catatan SLIK kurang baik) | Edukasi mengenai pengelolaan utang | Program edukasi pengelolaan utang dan manajemen keuangan | |

Dimensi Penggunaan

| Indikator | Permasalahan | Upaya Penyelesaian Masalah | Program Inklusi Keuangan | Lembaga/Instansi Terkait |
|--|---|--|--|--|
| 6. Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total | Ketidaksetaraan akses kredit/ pembiayaan antara laki-laki dan perempuan | Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam akses kredit | Program pemberdayaan perempuan dalam akses kredit/ pembiayaan | <input type="checkbox"/> K/L/D yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan UMKM dan/ atau bidang pemberdayaan perempuan <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> PUJK |
| | | Mengurangi kesenjangan penyaluran kredit/ pembiayaan UMKM perempuan | Program/Model/ Penyaluran Produk kredit/pembiayaan Perempuan Pelaku UMKM | |
| 7. Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk dewasa | Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai asuransi | Sosialisasi dan edukasi mengenai asuransi | Program edukasi asuransi | <input type="checkbox"/> K/L/D yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian/ peternakan/ perikanan <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> PUJK <input type="checkbox"/> Akademisi |
| | | | Pengembangan materi edukasi asuransi | |
| 8. Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah | Tingginya biaya premi asuransi | Pengembangan produk asuransi mikro | Asuransi mikro | <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> PUJK <input type="checkbox"/> Akademisi |
| | | Subsidi premi asuransi | Program subsidi premi asuransi | |
| 9. Jumlah pemilik BPJS Mandiri/ Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah | | | | |

Dimensi Ketersediaan

| Indikator | Permasalahan | Upaya Penyelesaian Masalah | Program Inklusi Keuangan | Lembaga/Instansi Terkait |
|---|--|---|---|--|
| 1. Ketersediaan ATM per 100.000 Orang Dewasa | Terbatasnya ketersediaan ATM di daerah pedesaan dan 3T | Perluasan jaringan ATM dengan menyediakan layanan <i>Cash Deposit Machine</i> (CDM) | Program perluasan jaringan ATM, mengutamakan CDM (sesuai dengan kebutuhan daerah) | <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> Perbankan atau Penyedia Layanan ATM dan Sistem Pembayaran termasuk BPD |
| | Tingginya biaya transaksi di ATM | Program ATM tanpa biaya transaksi | Program ATM tanpa biaya transaksi | |
| 2. Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 Orang Dewasa | Terbatasnya jumlah agen Laku Pandai | Peningkatan jumlah dan kualitas agen Laku Pandai | Program pengembangan dan pelatihan agen Laku Pandai | <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> Lembaga Jasa Keuangan (LJK) |
| | Biaya transaksi setoran di Agen Bank kurang mendukung partisipasi Masyarakat untuk menabung di agen Laku Pandai. | Penetapan biaya transaksi setoran yang lebih terjangkau di agen bank | Penetapan biaya transaksi setoran yang lebih terjangkau di agen bank | <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> LJK |
| 3. Ketersediaan Merchant QRIS per 100.000 Orang Dewasa | Terbatasnya jumlah merchant QRIS | Perluasan QRIS | Program perluasan QRIS | <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> Lembaga SP |
| | | Sosialisasi dan edukasi QRIS | Sosialisasi dan edukasi QRIS kepada masyarakat dan pelaku usaha | |
| | Kurangnya pemahaman masyarakat tentang QRIS | Edukasi mengenai QRIS | Program edukasi QRIS Pengembangan materi edukasi QRIS termasuk perlindungan konsumen | |

Dimensi Kedalaman

| Indikator | Permasalahan | Upaya Penyelesaian Masalah | Program Inklusi Keuangan | Lembaga/Instansi Terkait |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1. Rasio DPK terhadap PDRB | Rendahnya Dana Pihak Ketiga (DPK) | Peningkatan literasi dan inklusi keuangan | Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan | <input type="checkbox"/> K/L yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan |
| | | Pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif | Pengembangan produk dan layanan keuangan simpanan yang inovatif | <input type="checkbox"/> OJK |

Dimensi Kedalaman

| Indikator | Permasalahan | Upaya Penyelesaian Masalah | Program Inklusi Keuangan | Lembaga/Instansi Terkait |
|---|---|--|--|---|
| 2. Rasio Pinjaman UMKM terhadap Total Pinjaman | Rendahnya akses UMKM terhadap kredit | Penguatan program pembiayaan UMKM | <input type="checkbox"/> Program KUR <input type="checkbox"/> Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) <input type="checkbox"/> Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) | <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> OJK <input type="checkbox"/> LJK penyalur kredit/pembiayaan <input type="checkbox"/> Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan ITSK Pemeringkat Kredit Alternatif <input type="checkbox"/> K/L yang menyelenggarakan urusan bidang Perindustrian dan perdagangan |
| | | Kebijakan kemudahan akses kredit/pembiayaan | Regulasi/kebijakan kemudahan akses kredit/pembiayaan kemudahan prosedur, subsidi suku bunga, insentif, rasio penyaluran kredit, atau jaminan kredit Optimalisasi interkoneksi sistem informasi perkreditan dan sistem terkait | |
| | Tingginya risiko kredit UMKM dan perlunya penguatan kapasitas dan kualitas UMKM | Penguatan kapasitas dan manajemen risiko kredit UMKM | Program pendampingan pencatatan informasi keuangan bagi UMKM | |
| | | Penguatan kualitas UMKM | Program penguatan kapasitas UMKM, program satu pintu untuk pengurussertifikasi halal, legalitas usaha, hak merk, izin BPOM, dan PIRT | |
| Perlunya penguatan ekosistem hilirisasi <i>supply-chain</i> antara perusahaan besar dengan UMKM | Pengembangan hilirisasi ekonomi daerah | Pengembangan hilirisasi ekonomi daerah bagi UMKM berbasis komoditas dan industri kreatif, contoh: hilirisasi komoditas pisang, sawit, dan ternak dengan interlink ke perusahaan besar. | <input type="checkbox"/> K/L yang menyelenggarakan urusan bidang perindustrian dan perdagangan <input type="checkbox"/> K/L yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan | |
| | Peningkatan akses UMKM dalam rantai pasok | Kebijakan/regulasi daerah untuk mendukung keterlibatan UMKM dalam hilirisasi. | <input type="checkbox"/> K/L yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi dan UMKM <input type="checkbox"/> OPD yang menyelenggarakan urusan bidang Koperasi dan UMKM | |
| 2. Rasio Pinjaman UMKM terhadap Total Pinjaman | Perlunya peningkatan kontribusi UMKM terhadap pasar global (ekspor) | Peningkatan daya saing UMKM | Program peningkatan kualitas produk UMKM, program pemasaran digital, dan program pendampingan ekspor | <input type="checkbox"/> K/L yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi, UMKM, dan Perdagangan |

IV.2.3 Mendorong Peningkatan Akses Keuangan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Akses keuangan yang inklusif, memadai, dan merata merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti tabungan, kredit/pembiayaan, asuransi, dan investasi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kontribusi akses keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditinjau dalam dua aspek, yaitu kredit/pembiayaan serta simpanan dan produk keuangan lainnya. Melalui akses terhadap kredit, individu dan pelaku usaha dapat membiayai kegiatan produktif (investasi, modal kerja, pengembangan usaha) hingga peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut akan berkontribusi kepada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, hingga pengurangan kemiskinan.

Akses kepada produk simpanan dan produk keuangan lain seperti asuransi dan investasi, memperkuat aliran dana ke dalam sistem keuangan. Hal ini akan mendukung likuiditas pasar kredit dan menyediakan sumber pembiayaan bagi kegiatan produktif. Selain itu, produk keuangan seperti asuransi membantu melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat kejadian tak terduga, sementara investasi memungkinkan akumulasi aset dan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Pemerataan inklusi keuangan memiliki dampak positif yang luas, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, ketahanan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Untuk mendukung hal tersebut, IKAD memiliki peran strategis sebagai instrumen pengukur capaian program peningkatan akses keuangan daerah. Ketiga dimensi IKAD – penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman – memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan inklusi keuangan di masyarakat, tantangan dan potensi, serta masukan bagi pengambil keputusan dalam menentukan program yang tepat berdasarkan data.

IV.2.4 Penyelarasan Kebijakan Inklusi Keuangan dengan Asta Cita untuk Pembangunan Ekonomi Pancasila

Asta Cita menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan serta pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan semangat gotong royong dan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan inklusi keuangan harus dirancang dan diimplementasikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai fundamental Pancasila, yaitu moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini akan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyelarasan kebijakan tersebut antara lain melalui:

- a. **Kebijakan inklusi keuangan perlu memprioritaskan pemberdayaan masyarakat** melalui akses keuangan untuk mendukung pembangunan yang dimulai dari desa dan dari bawah. Objek dari kebijakan ini dimulai dari masyarakat perdesaan, pelaku UMKM, hingga kelompok masyarakat rentan. Adapun program yang dapat terlibat antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan;
- b. **Kebijakan inklusi keuangan perlu mendorong pemerataan ekonomi** dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan inklusi keuangan dapat berperan melalui perluasan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keuangannya;
- c. **Kebijakan inklusi keuangan perlu mendukung pembangunan berkelanjutan**, yaitu tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Inklusi keuangan dapat berperan dalam pengembangan produk dan layanan keuangan ramah lingkungan seperti pembiayaan energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan;

- d. Kebijakan inklusi keuangan perlu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan sektor strategis lainnya. Inklusi keuangan dapat berperan melalui pembiayaan dan investasi yang sesuai dan memadai.

IV.3. Rekomendasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Berdasarkan Wilayah

IV.3.1. Rekomendasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Kota dan Kabupaten

a. Kota

- i. Mendorong pemberdayaan dan pembiayaan untuk UMKM wilayah kota, terutama perempuan pengusaha;
- ii. Mendorong kesadaran, pengetahuan, pengelolaan risiko keuangan masyarakat melalui kegiatan literasi/edukasi;
- iii. Perluasan dan penguatan ekosistem keuangan digital.

b. Kabupaten

- i. Mendorong adopsi teknologi keuangan digital dengan perluasan ekosistem keuangan digital melalui perluasan merchant QRIS, digitalisasi ekosistem pendidikan, peningkatan insentif agen Laku Pandai, dan sebagainya;
- ii. Mendorong peningkatan kepemilikan rekening, antara lain melalui implementasi program KEJAR dan Laku Pandai di lingkungan sekolah, perluasan adopsi asuransi mikro, pendirian lembaga keuangan mikro seperti LKM/S atau KSP/USP atau KSPPS/USPPS, dan sebagainya;
- iii. Mendorong kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan produk serta layanan keuangan melalui program edukasi/literasi, termasuk di dalamnya pengelolaan risiko keuangan;
- iv. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kepada UMKM, pengusaha perempuan, dan ekosistem komunitas.

IV.3.2. Rekomendasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Barat, Tengah, dan Timur

Secara garis besar, peningkatan akses keuangan dilakukan melalui implementasi rekomendasi kebijakan melalui implementasi IKAD, yaitu penyesuaian indikator utama pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD dengan IKAD, melakukan intervensi kebijakan dengan basis data IKAD, mendorong peningkatan akses keuangan di daerah, serta penyesuaian kebijakan inklusi keuangan daerah dengan Asta Cita. Adapun kebijakan di setiap wilayah TPAKD adalah sebagai berikut:

a. Barat

- i. Mendorong perluasan jangkauan layanan keuangan melalui agen Laku Pandai serta *merchant* QRIS pada daerah residensial, pelaku UMKM dan daerah wisata.
- ii. Mendorong kepemilikan rekening simpanan, baik melalui lembaga perbankan maupun non bank sesuai dengan kebutuhan dan kultur budaya masyarakat setempat;
- iii. Mendorong pemberdayaan perempuan, antara lain melalui edukasi keuangan dan pengembangan perempuan pengusaha.

b. Tengah

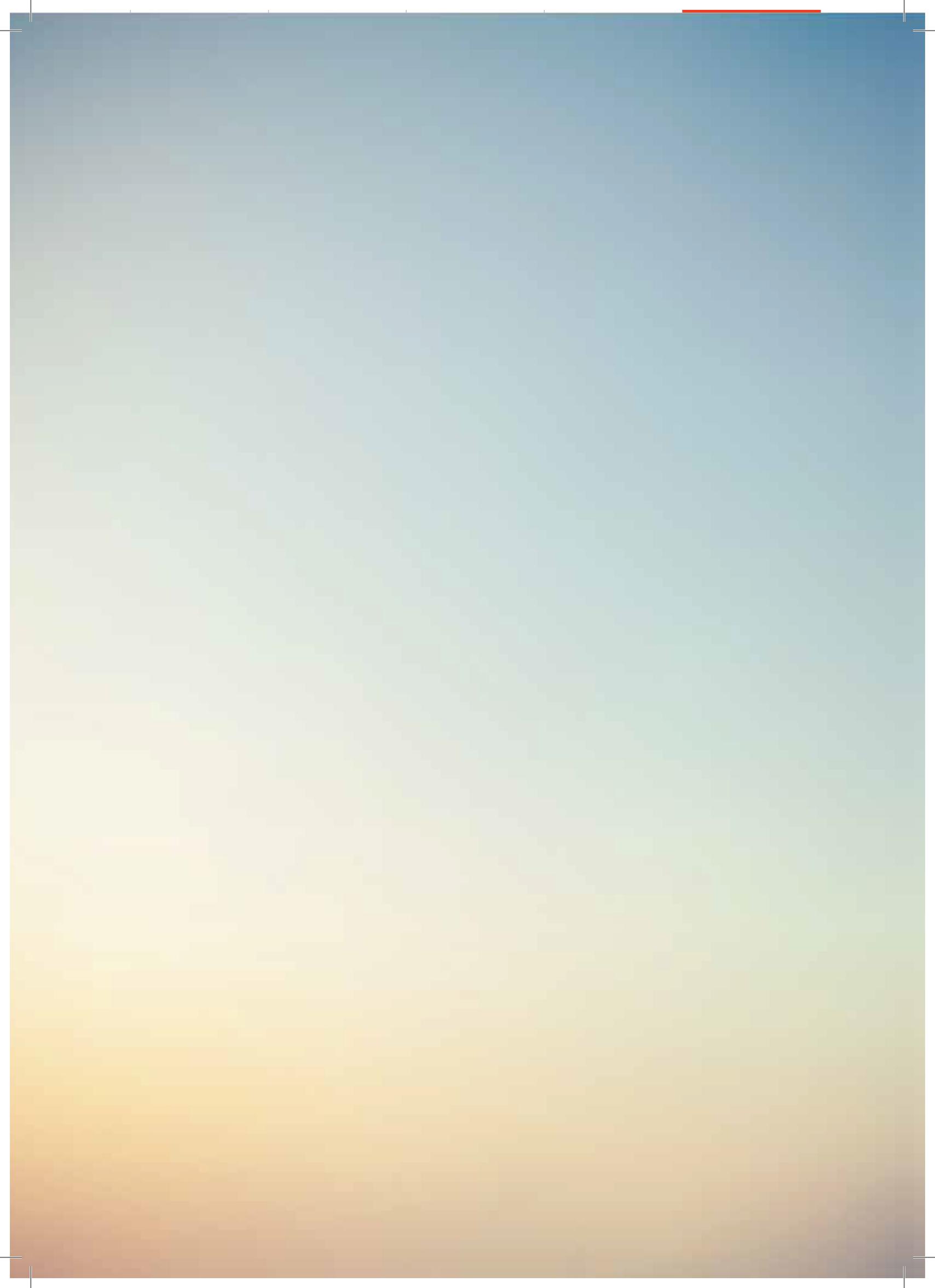
Wilayah tengah perlu memprioritaskan pendalaman keuangan dengan tetap mendorong perluasan akses keuangan dan kepemilikan rekening tabungan serta *e-wallet*. Hal tersebut perlu dilakukan terutama pada daerah kabupaten/kota dengan kategori per dimensinya adalah kategori Dasar (1), Mulai Berkembang (2), dan Berkembang (3) di kawasan Jawa dan Kalimantan.

c. Timur

- i. Mendorong perluasan jangkauan layanan keuangan melalui agen Laku Pandai serta *merchant* QRIS pada daerah residensial, pelaku UMKM dan daerah wisata;
- ii. Mendorong peningkatan kepemilikan rekening, antara lain melalui implementasi program KEJAR dan Laku Pandai di lingkungan sekolah, peningkatan adopsi asuransi mikro, pendirian lembaga keuangan mikro seperti LKM/S atau KSP/USP atau KSPPS/USPPS, dan sebagainya.

IV.3.3. Rekomendasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Daerah Kepulauan

- a. Edukasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai manajemen keuangan dan produk serta layanan keuangan;
- b. Perluasan akses keuangan melalui agen Laku Pandai di setiap desa dengan infrastruktur pendukung, misalnya *floating bank* (bank terapung);
- c. Perluasan pemanfaatan ekosistem keuangan digital melalui penggunaan QRIS untuk UMKM, integrasi QRIS dan agen Laku Pandai di Desa Wisata, dan sebagainya yang didukung oleh infrastruktur digital;
- d. Pendirian lembaga keuangan yang dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat, misalnya LKM/S atau KSP/USP atau KSPPS/USPPS;
- e. Penyediaan produk serta layanan keuangan yang mudah, murah, dan minim persyaratan namun tetap memenuhi ketentuan, misalnya *basic saving account*, asuransi mikro, pembiayaan bersubsidi, dan sebagainya;
- f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kepada UMKM, pengusaha perempuan, dan komunitas.
- g. Mendorong implementasi model keuangan berbasis komunitas.





Rujukan

Rujukan



- Abel, S., Mukarati, J., Mutandagayi, V., & Le Roux, P. (2024). Nexus between financial inclusion and economic growth. *African Journal of Business and Economic Research*.
- Adhikary, B. K., Kutsuna, K., & Stephannie, S. (2021). Does the government credit guarantee promote micro, small, and medium enterprises? Evidence from Indonesia. *Journal of Small Business and Entrepreneurship*.
- Alexander, K. (2021). Financial inclusion and banking regulation: The role of proportionality. *Law and Contemporary Problems*.
- Ambarkhane, D., Singh, A. S., & Venkataramani, B. (2016). Measuring financial inclusion of Indian states. *International Journal of Rural Management*.
- Anthanasius Fomum, T., & Opperman, P. (2023). Financial inclusion and performance of MSMEs in Eswatini. *International Journal of Social Economics*.
- Aparna, V., Anthuvan, V.L. (2022). Determinants of Financial Inclusion Among Dalit Women in Kancheepuram District, Tamil Nadu. *Contemporary Voice of Dalit*.
- Azimi, M. N. (2022). New insights into the impact of financial inclusion on economic growth: A global perspective. *PLoS ONE*.
- Bhatnagar, M., & Pathak, N. (2023). Assessing the role of entrepreneurial development programs, Digital India, and sustainable investments in accelerating financial inclusion initiative. *Sustainable Investments in Green Finance*.
- Cabeza-García, L., Del Brio, E. B., & Oscanoa-Victorio, M. L. (2019). Female financial inclusion and its impacts on inclusive economic development. *Women's Studies International Forum*.
- Chaora, B. R. (2024). The role of institutions in promoting financial inclusion of MSMEs in Zimbabwe. *Sustainable Development Goals Series*.
- Chitimira, H., Warikandwa, T.V. (2023). Financial Inclusion as an Enabler of United Nations Sustainable Development Goals in the Twenty-First Century: An Introduction. *Ius Gentium*.
- Chu, A. B. (2018). Mobile technology and financial inclusion. In *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 1: Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, and Regulation*.
- Chukwunweike Ehiedu, V., Anthony Ogormegbunan, O., & Kifordu, A. A. (2020). Estimators and economic growth nexus in financial deepening: Perspectives from a small open economy.
- Cuéllar, L. I. P. (2019). International financial inclusion: Multidimensional determinants of access to saving and credit. *Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics*.
- Darrat, A. F., Elkhal, K., & McCallum, B. (2006). Finance and macroeconomic performance: Some evidence for emerging markets. *Emerging Markets Finance and Trade*.
- Dela Cruz, N. A., Villanueva, A. C. B., Tolin, L. A., & White, H. (2023). PROTOCOL: Effects of interventions to improve access to financial services for micro-, small- and medium-sized enterprises in low- and middle-income countries: An evidence and gap map. *Campbell Systematic Reviews*.
- Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2013). Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries. *Brookings Papers on Economic Activity*.
- El Amri, M. C., Mohammed, M. O., & Bakr, A. M. (2021). Enhancing financial inclusion using FinTech-based payment system. In *Islamic FinTech: Insights and Solutions*.
- Eshun, S.F., Kočenda, E. (2025). Determinants of financial inclusion in sub-Saharan Africa and OECD countries. *Borsa Istanbul Review*.
- Fahmy, M., & Ghoneim, H. (2023). Financial inclusion demand-side determinants: Analysis from Egypt. *Management and Sustainability*.
- Fanta, A., Mutsonziwa, K. (2023). Financial Literacy as a Driver of Financial Inclusion in Kenya and Tanzania. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Ferrata, L. (2019). Digital financial inclusion - An engine for "leaving no one behind". *Public Sector Economics*.
- Ghosh, C., & Chaudhury, R. H. (2024). Ranking of countries based on multidimensional financial inclusion index: A global perspective. *International Journal of Finance and Economics*.
- Ghosh, S., Sahu, T.N. (2021). Financial inclusion and economic status of the states of India: An empirical evidence. *Economic Notes*.

Rujukan



- Giedion, U., & Díaz, B. Y. (2010). A review of the evidence. In *The Impact of Health Insurance in Low- and Middle-Income Countries* (pp. 13–33). *Brookings Institution Press*.
- Grishanova, S.V., Yakovenko, V.S., Skrebtsova, T.V., (...), Ponomarenko, M.V. (2022). Financial Inclusion and Digitalization. *Advances in Science, Technology and Innovation*.
- Grohmann, A., Klühs, T., Menkhoff, L. (2018). Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. *World Development*.
- Gupta, U., Agarwal, B., & Nautiyal, N. (2022). Financial technology adoption—A case of Indian MSMEs. *Finance: Theory and Practice*.
- Hidayat, P., & Sari, R. L. (2022). Linkage between financial inclusion and Indonesian welfare: A recent evidence. *Cogent Business and Management*.
- Jain, P., Upadhyay, D., & Purswani, G. (2021). Digital financial inclusion: Strategic issues and imperatives. In *Financial Inclusion in Emerging Markets: A Road Map for Sustainable Growth*.
- Jima, M.D., Makoni, P.L. (2023). Determinants of Sustainable Financial Inclusion in Sub-Saharan Africa: A System GMM Approach. *Prague Economic Papers*.
- Kanga, D., Soumare, I., & Tchougoua, H. T. (2024). Financial sector development and microcredit to small firms. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*.
- Kodom, M., Osarfo, D., & Quartey, P. (2024). Digital financial inclusion and women's economic empowerment in Northern Ghana: The experience of rural women in the Shea value chain. *Sustainable Development Goals Series*.
- Koesmahargyo, H., Wahyuni, S., & Chalid, D. A. (2024). Organizational learning and boundary spanners' agility in financial inclusion in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*.
- Kumarasamy, D., Singh, P., & Sharma, A. K. (2024). Financial accessibility and MSME's labour productivity: Evidence from developing countries. *Indian Growth and Development Review*.
- Kumari, D. A. T., Ferdous Azam, S. M., & Khalidah, S. (2020). Financial literacy: A tool for enhancing financial inclusion among rural population in Sri Lanka. *International Journal of Scientific and Technology Research*.
- Mahlawat, S., & Batra, V. (2020). Analytical study on role of MSME financing in development of economy. *International Journal of Advanced Science and Technology*.
- Mhlanga, D. (2025). Advancing Prosperity in Africa: Navigating Complexities and Policy Responses for Digital Financial Inclusion. In *Financial Inclusion and Sustainable Development in Sub-Saharan Africa*.
- Mirdala, R. (2011). Financial deepening and economic growth in the European transition economies. *Journal of Applied Economic Sciences*.
- Mohd Daud, S.N., Ahmad, A.H., Trinugroho, I. (2024). Financial inclusion, digital technology, and economic growth: Further evidence. *Research in International Business and Finance*.
- Mohey-Ud-Din, G., Ikram, K. (2023). Is Economic Growth Inclusive in Punjab, Pakistan? A District Level Assessment Using the Composite Index. *Pakistan Development Review*.
- Mukhopadhyay, J. P. (2016). Financial inclusion in India: A demand-side approach. *Economic and Political Weekly*.
- Muschert, G. W., Nair, S. K., & Nair, B. A. V. (2024). On financial inclusion and global development: An introductory remark. *Sustainable Development Goals Series*.
- Nagaaba, N., Batamuriza, R., Basuta, J., & Owomugisha, M. (2025). Conceptualizing digital finance as a precursor for financial inclusion and financial service usage in Uganda. *Cogent Business and Management*.
- Nousheen Tariq Bhutta, B. S., & Avvisati, G. (2021). Impact of financial deepening on exchange rate: Spillover evidence from developed and developing economies. *Electronic Journal of Applied Statistical Analysis*.
- Obiora, K., Ozili, P.K. (2023). Benefits of digital-only financial inclusion. In *The Impact of AI Innovation on Financial Sectors in the Era of Industry 5.0*.
- Pandey, A., Murugesan, R. (2024). A universal financial inclusion index covering banking, insurance and pension services in India. *International Journal of Economics and Business Research*.

Rujukan



- Pradhan, T. K. (2023). A framework for measuring financial inclusion in India: Bridging gaps between theory and practice. *Journal of Financial Counseling and Planning*.
- Ranabhat, D., Verma, N., Sapkota, P., Chhetri, S.D. (2023). Effects of Financial Literacy on Financial Inclusion: Evidence from Nepal's Gandaki Province. *Lecture Notes in Networks and Systems*.
- Ravikumar, T. (2020). Financial access indicators of financial inclusion: A comparative analysis of SAARC countries. *International Journal of Intelligent Enterprise*.
- Rawat, R., Sharma, S., Goyal, H.R. (2023). Intelligent Digital Financial Inclusion System Architectures for Industry 5.0 Enabled Digital Society. *Winter Summit on Smart Computing and Networks, WiSSCoN 2023*.
- Saha, D., Alam, R. (2022). Revisiting Financial Inclusion with Human Development in India. *Indian Journal of Human Development*.
- Sarma, M. (2024). UN SDG Indicators 8.10 for measuring financial inclusion: An assessment. *Sustainable Development Goals Series*.
- Shapoval, Y., Shkliar, A., Shpanel-Yukhta, O., & Gruber, K. (2021). The level of financial inclusion in Ukraine: Measuring access, quality, and usage of financial products and services. *Banks and Bank Systems*.
- Siddik, M. N. A., & Kabiraj, S. (2018). Does financial inclusion induce financial stability? Evidence from cross-country analysis. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*.
- Valera, M. L. G., Lei, Z., & Fong, J. H. (2024). Determinants of financial inclusion in Southeast Asia. *Applied Economics*.
- Yap, S., Lee, H. S., & Liew, P. X. (2024). The roles of insurance and banking services on financial inclusion. *SAGE Open*.
- Zheng, L., & Su, Y. (2022). Inclusive insurance, income distribution, and inclusive growth. *Frontiers in Public Health*.



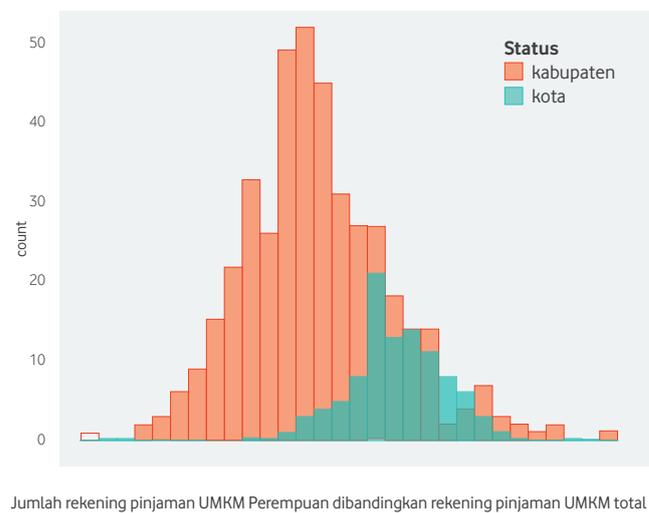
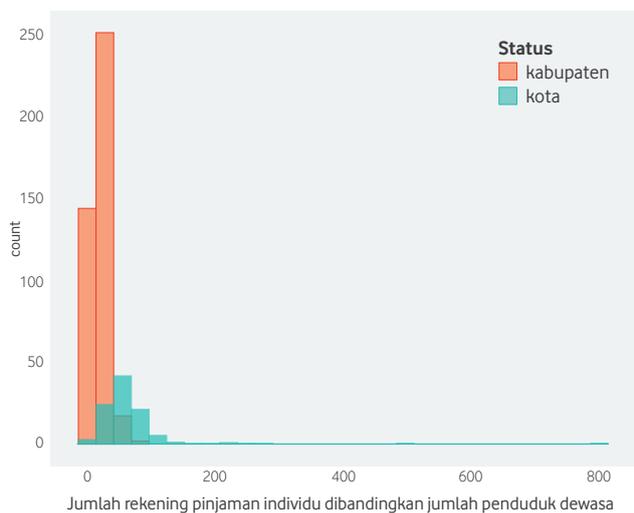
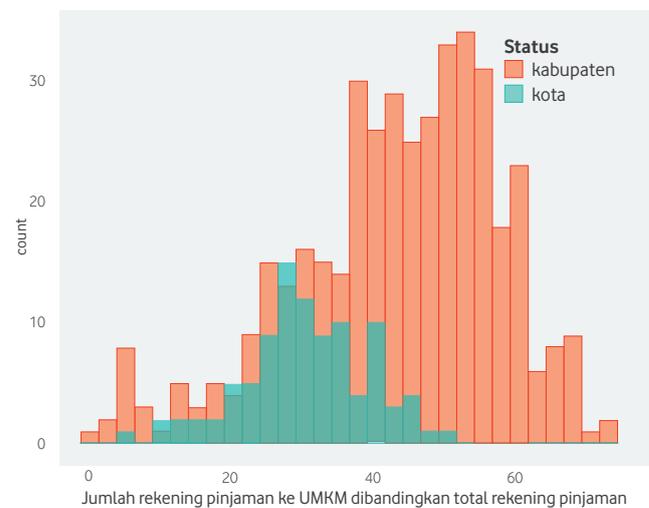
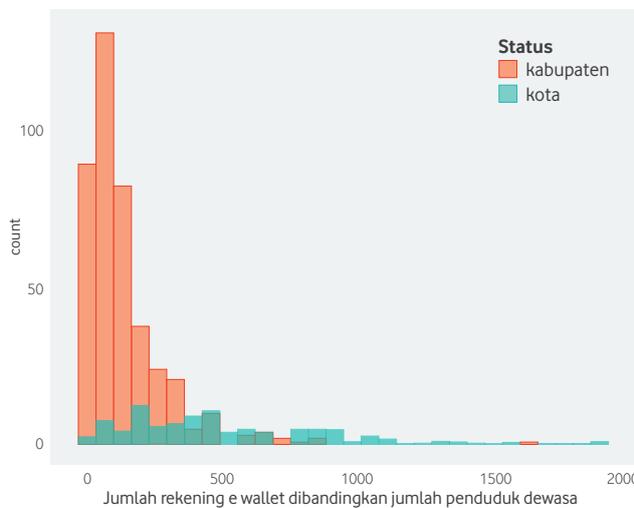
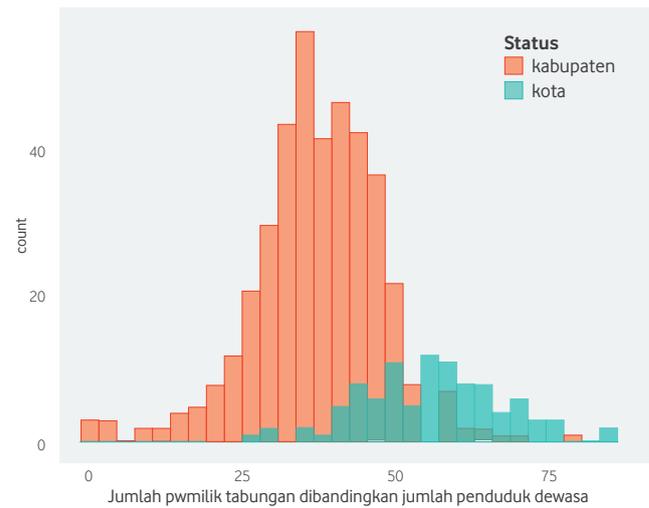
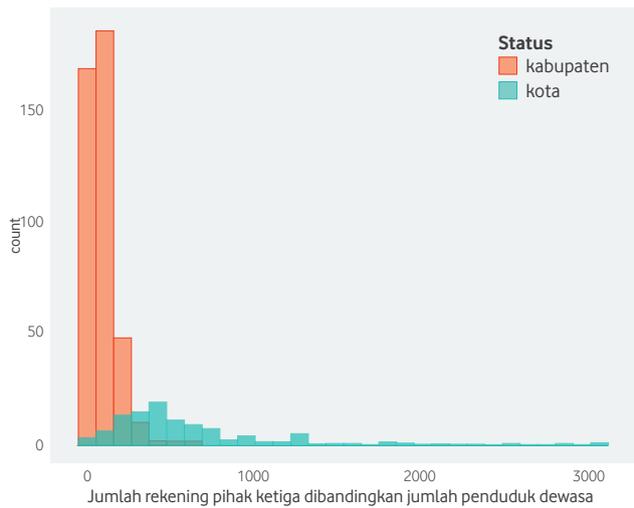
LAMPIRAN 1. Batas-batas yang ditetapkan untuk kategorisasi masing-masing indikator penyusun indeks IKAD

| No | Indikator | Batas 1 | Batas 2 | Batas 3 | Batas 4 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 2 | Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 3 | Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 120 | 160 | 200 | 240 |
| 4 | Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 5 | Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 10,5 | 17,5 | 24,5 | 31,5 |
| 6 | Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 7 | Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk dewasa | 2,5 | 10 | 17,5 | 25 |
| 8 | Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah | 35 | 50 | 65 | 80 |
| 9 | Jumlah pemiliki BPJS mandiri/asuransi swasta/Jamkes perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah | 5 | 15 | 25 | 35 |
| 10 | Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 11 | Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 12 | Ketersediaan QRIS per 100.000 penduduk dewasa | 1.500 | 4.500 | 7.500 | 10.500 |
| 13 | Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 |
| 14 | Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman | 20 | 30 | 40 | 50 |

LAMPIRAN 2. Visualisasi Hasil Perhitungan Indikator IKAD

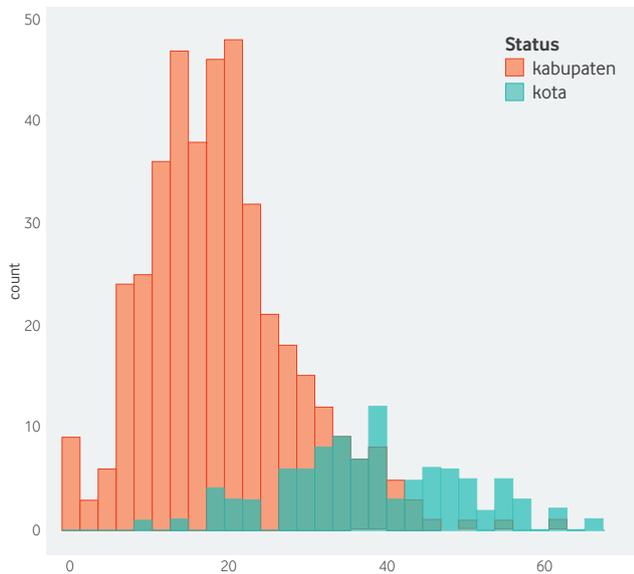
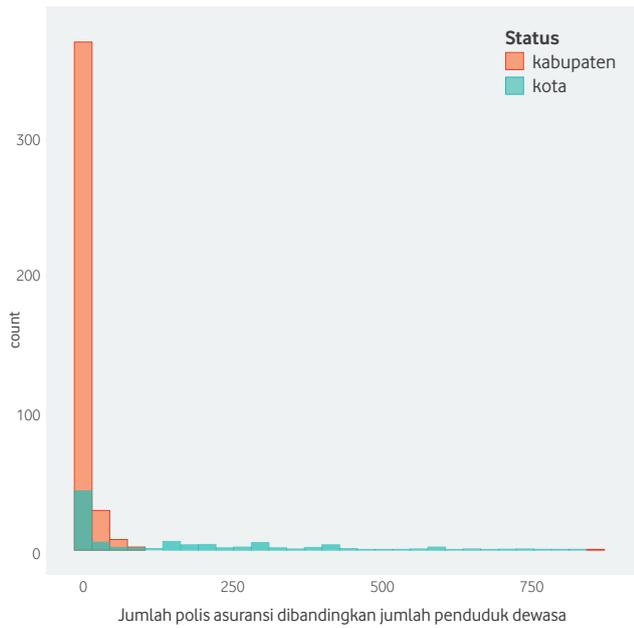
Sebaran Indikator Pada Dimensi Penggunaan

Gambar di bawah ini menyajikan sebaran indikator untuk dimensi penggunaan. Secara umum, wilayah kota memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten, kecuali pada indikator REKPINJAMAN_UMKM, di mana kabupaten menunjukkan nilai lebih tinggi, serta indikator POLIS yang menunjukkan nilai relatif serupa antara kabupaten dan kota. Selain itu, beberapa indikator terlihat memiliki nilai ekstrim, yaitu REK3, EWALLET, REKPINJAMAN_IND, dan POLIS. Dalam proses standardisasi Min-Max, keempat indikator yang memiliki nilai ekstrim tersebut menggunakan persentil ke-95 sebagai batas atas, sementara lima indikator lainnya menggunakan nilai maksimum sebagai batas atas.

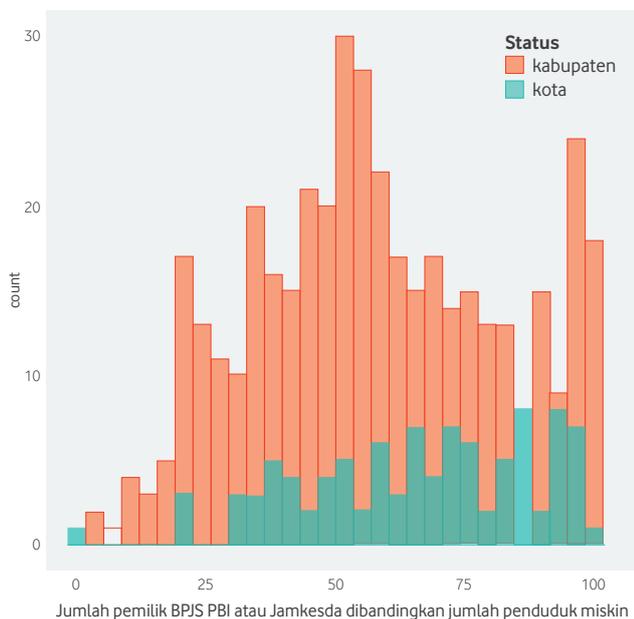


Sebaran Indikator Pada Dimensi Ketersediaan

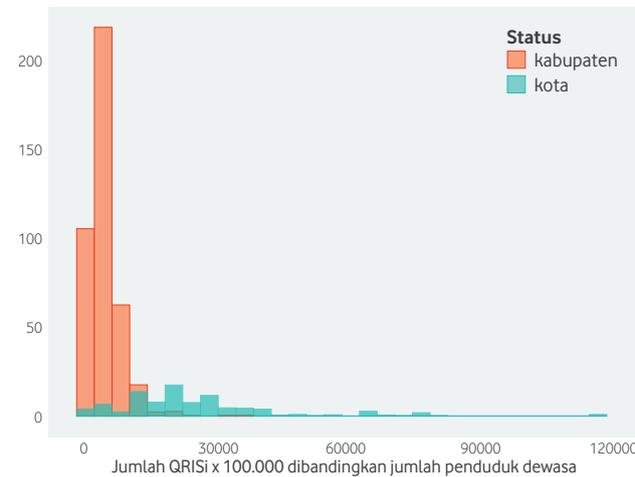
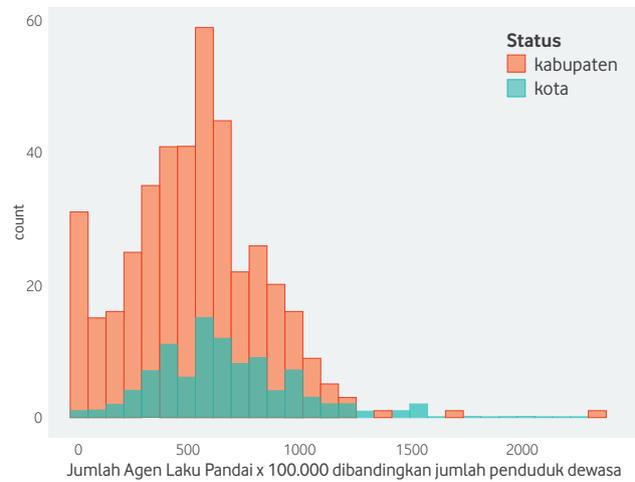
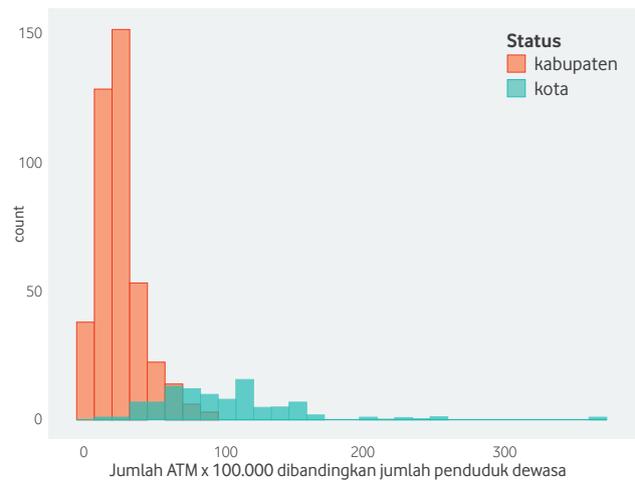
Gambar berikut menyajikan sebaran indikator untuk dimensi ketersediaan. Indikator ATM dan QRIS pada wilayah kota memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Sedangkan untuk indikator AGEN, kedua wilayah tersebut relatif tidak berbeda. Selain itu, ketiga indikator pada dimensi ini menunjukkan nilai ekstrim, sehingga digunakan nilai persentil 95 sebagai batas atas saat standardisasi Min-Max.



Jumlah BPJS mandiri/asuransi swasta/Jamkes perusahaan dibandingkan penduduk non miskin

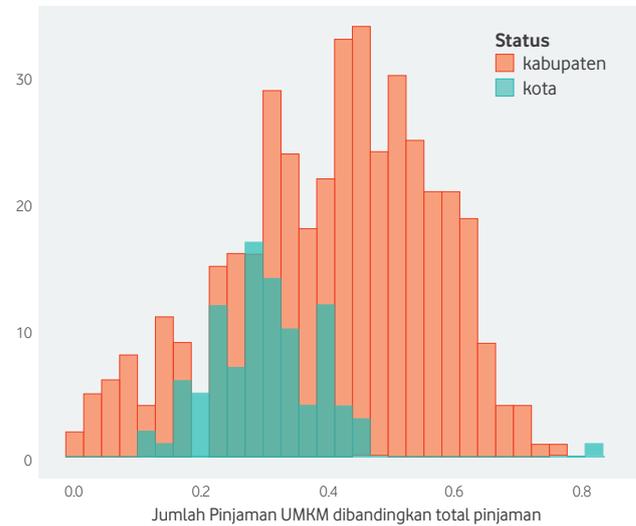
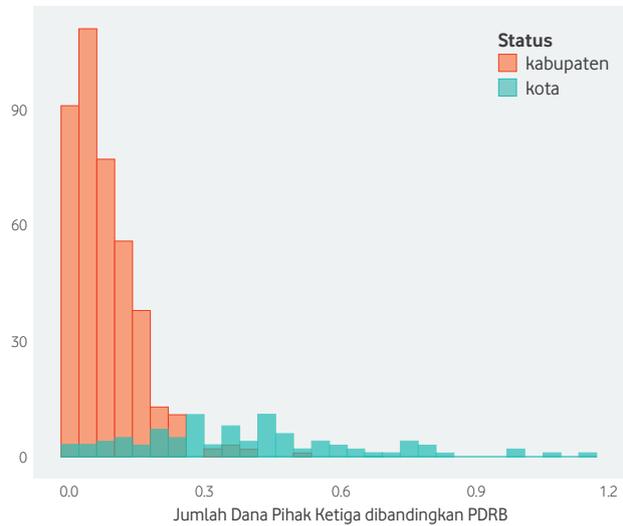


Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda dibandingkan jumlah penduduk miskin



Sebaran Indikator Pada Dimensi Kedalaman

Gambar di bawah menunjukkan 2 indikator pada dimensi kedalaman. Nilai wilayah kota lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten untuk Indikator DPK, namun terjadi sebaliknya untuk indikator PINJAMAN_UMKM. Pada periode data, terdapat nilai ekstrim pada Indikator DPK sehingga ketika dilakukan standardisasi Min-Max, digunakan persentil 95.



LAMPIRAN 3. Penjelasan Indikator

Tabel Penjelasan Indikator IKAD

| No. | Indikator | Studi Terkini yang Relevan | Negara/Lembaga |
|--|--|---|---|
| 1. Usage/Penggunaan kategori simpanan | | | |
| 1.a | Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa | Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013; El Amri et al., 2021; Sarma, 2024; Alexander, 2021; Sarma, 2024; Mukhopadhyay, 2016; Fahmy & Ghoneim, 2023; Ambarkhane et al., 2016; Uphadhyay & Reddy, 2021. | Malaysia, Filipina, Thailand, G20, World Bank, UNCDF |
| 1.b | Jumlah Pemilik Tabungan (di bank dan/atau koperasi) dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Dewasa | Cuéllar, 2019; Valera et al., 2024. | Malaysia, Filipina, Thailand, India, G20, World Bank, UNCDF |
| 1.c | Jumlah Rekening e-Wallet dibandingkan dengan Penduduk Dewasa | Chu, 2018; Jain et al., 2021. | Malaysia, Filipina, Thailand, G20, World Bank, UNCDF |
| 2. Usage/Penggunaan kategori pinjaman | | | |
| 2.a | Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman | Anthanasius Fomum & Opperman, 2023; Dela Cruz et al., 2023; Gupta et al., 2022; Chaora, 2024; Ratnawati, 2020; Kumarasamy et al., 2024; Siddik & Kabiraj, 2018; Anthanasius Fomum & Opperman, 2023. | Filipina, India, G20, World Bank |
| 2.b | Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa | Ravikumar, 2020; Kumari et al., 2020; Siddik & Kabiraj, 2018. | Malaysia, Filipina, Thailand, India, G20, World Bank, UNCDF |
| 2.c | Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total | Cabeza-Garcia et al., 2019; Antonijević et al., 2024; Tripathi & Rajev, 2023; Kodom et al., 2024. | Filipina |
| 3. Usage/Penggunaan kategori Asuransi | | | |
| 3.a | Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk dewasa | Yap et al., 2024; Zheng & Su, 2022; Ghosh & Chaudhury, 2024. | Malaysia, Filipina, India, G20, World Bank, UNCDF |
| 3.b | Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk miskin berpenghasilan rendah | Giedion & Díaz, 2010 (Asuransi kesehatan secara umum, tidak mengacu kepada produk). | Malaysia (takaful), Filipina (asuransi mikro) |
| 3.c | Jumlah pemilik BPJS Mandiri/ Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah | Giedion & Díaz, 2010 (Asuransi kesehatan secara umum, tidak mengacu kepada produk). | Malaysia (takaful), India (non-life) |
| 4. Availability/Ketersediaan | | | |
| 4.a | Ketersediaan ATM per 100.000 Orang Dewasa | Sarma, 2024 | Malaysia, India, G20, UNCDF |
| 4.b | Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 Orang Dewasa | Ravikumar, 2020; Koesmahargayo, Wahyudi, & Chalid, 2024; Dawood et al., 2019; Muthia et al., 2019; Nagaaba et al., 2025. | Malaysia, India, G20, IMF, World Bank |

| No. | Indikator | Studi Terkini yang Relevan | Negara/Lembaga |
|---|---|--|---|
| 4.c | Ketersediaan Merchant QRIS per 100.000 Orang Dewasa | Nandru & Chendragiri, 2024; Sumaylo et al., 2022. | Filipina, India, G20, World Bank |
| | | Pembayaran digital melalui QR Code secara umum. | |
| 5. Kedalaman Keuangan (<i>Financial Deepening</i>) | | | |
| 5.a | Rasio DPK (Bank dan BPR/S) dengan PDRB | Chukwunweike Ehiedu et al., 2020 | World Bank (Gross Saving, % of GDP), digunakan sebagai indikator global |
| 5.b | Rasio Pinjaman UMKM terhadap Total Pinjaman | Begum et al., 2024; Thangavel & Hariharan, 2015; Thangavel & Hariharan, 2015; Mahlawat & Batra, 2020; Kanga et al., 2024; Adhikary et al., 2021. | G20, IMF |

Narasi Penjelasan Indikator IKAD

1. Usage/Penggunaan kategori simpanan

- a. Indikator **Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa** berusaha untuk menggambarkan tingkat kepemilikan akun/rekening lembaga keuangan formal (Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013; El Amri et al., 2021; Sarma, 2024; Alexander, 2021). Indikator jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa, di perbankan, merupakan indikator yang penting dalam inklusi keuangan dan mencerminkan sejauh mana individu memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, yang penting bagi partisipasi dan pembangunan ekonomi serta merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam indikator SDG PBB (Sarma, 2024). Perhitungan perbandingan rekening pihak ketiga dengan penduduk dewasa dapat diperoleh melalui survei kepada masyarakat/*demand-side data* (Mukhopadhyay, 2016; Fahmy & Ghoneim, 2023) maupun bersumber dari data yang ada pada lembaga keuangan formal (*supply-side data*) (Ambarkhane et al., 2016; Uphadhyay & Reddy, 2021).
- b. Untuk dapat memberikan gambaran lebih lengkap, indikator **Jumlah Pemilik Tabungan (Di Bank Dan/ Atau Koperasi) dibandingkan jumlah Penduduk Dewasa** menggambarkan kemampuan penduduk dewasa untuk dapat menyimpan uangnya dengan aman dan sebagai awalan untuk membuka akses kepada produk dan layanan keuangan lainnya (Cuéllar, 2019; Valera et al., 2024).

- c. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, penggunaan e-wallet menjadi semakin jamak di masyarakat terutama daerah dengan dukungan infrastruktur yang memadai sehingga indikator **Jumlah rekening e-wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa** dapat melengkapi metode perhitungan inklusi keuangan lembaga keuangan formal tradisional seperti bank dan bagaimana perkembangan inklusi keuangan di era digital (Chu, 2018; Jain et al., 2021).

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa memiliki akun tidak selalu berarti penggunaan layanan keuangan akan selalu aktif karena terdapat kemungkinan terdapat individu yang memiliki akses terhadap layanan keuangan namun masih kesulitan untuk menggunakannya karena terdapat hambatan tertentu (Alexander, 2021). Kepemilikan rekening tabungan belum menggambarkan kedalaman dari inklusi keuangan berupa penggunaan rekening tersebut maupun kualitas dari layanan keuangan (Sarma, 2024; Pradhan, 2023) serta termasuk dalam SDG sub-target 8.10 yang menekankan inklusivitas ke berbagai layanan keuangan, bukan hanya rekening tabungan (Sarma, 2024).

2. Usage/Penggunaan kategori pinjaman

- a. UMKM memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan tingkat kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Anthanasius Fomum &

Opperman, 2023; Dela Cruz et al., 2023). Mendorong inklusi keuangan bagi UMKM melalui pinjaman, simpanan, asuransi, hingga layanan pembayaran (Gupta et al., 2022; Chaora, 2024) dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat. Meningkatnya inklusi keuangan bagi UMKM dapat mendorong performa usahanya, pangsa pasar, hingga tingkat keuntungan mereka (Ratnawati, 2020; Kumarasamy et al., 2024). Hal tersebut menandakan bahwa **Jumlah Rekening Pinjaman ke UMKM dibandingkan Total Rekening Pinjaman** merupakan salah satu indikator penting dalam inklusi keuangan, dimana akses UMKM terhadap layanan keuangan, terutama kredit, merupakan hal esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM (Siddik & Kabiraj, 2018; Anthanasius Fomum & Opperman, 2023).

- b. Selain kepada UMKM, akses pinjaman kepada individu memiliki hubungan dua arah (kausalitas) dengan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi (Abel et al., 2024). Akses yang lebih baik dari individu kepada pinjaman akan mendorong stabilitas sektor keuangan dan mengintegrasikan lebih banyak masyarakat ke dalam sistem keuangan formal sehingga dapat menekan sumber kredit informal (Siddik & Kabiraj, 2018) seperti rentenir. Pengukuran tingkat pinjaman individu terhadap total pinjaman menggunakan **Jumlah Rekening Pinjaman Individu dibandingkan Jumlah Penduduk Dewasa** dapat digunakan sebagai tolok ukur seberapa banyak penduduk dewasa memanfaatkan produk pinjaman (Ravikumar, 2020; Kumari et al., 2020).
- c. Demikian halnya dengan UMKM Perempuan, besarnya **Jumlah Rekening Pinjaman UMKM Perempuan dibandingkan Rekening Pinjaman UMKM Total** menggambarkan sejauh mana perempuan dapat mengakses fasilitas pinjaman untuk usaha mereka sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan (Cabeza-Garcia et al., 2019; Antonijević et al., 2024) yang sejalan dengan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Tripathi & Rajev, 2023; Kodom et al., 2024).

3. Usage/Penggunaan kategori Asuransi

- a. Pada praktiknya, asuransi memiliki peran penting untuk menyediakan ketahanan finansial dan manajemen risiko bagi individu dan rumah tangga. Asuransi, terutama asuransi non-jiwa, memiliki dampak positif dalam menutup kesenjangan

keuangan dan mendorong inklusi keuangan (Yap et al., 2024). Kehadiran asuransi yang inklusif telah terbukti memiliki peran untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan inklusif, khususnya di daerah rural dan berpendapatan rendah (Zheng & Su, 2022). Dalam mengukur penetrasi asuransi, dilakukan perhitungan berupa proporsi dari populasi yang memiliki polis asuransi, baik itu asuransi jiwa maupun non-jiwa (Ghosh & Chaudhury, 2024; Yap et al., 2024) atau dengan kata lain berupa **Jumlah Polis Asuransi dibandingkan Jumlah Penduduk Dewasa**.

- b. Lebih lanjut, asuransi kesehatan memiliki dampak dalam meningkatkan akses dan penggunaan layanan kesehatan serta memberikan perlindungan finansial terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah (Giedion & Díaz, 2010). Adapun produk asuransi kesehatan (mandatory maupun non mandatory) di Indonesia cukup beragam, antara lain:
 - i. BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Jamkesda; dan
 - ii. BPJS mandiri, Asuransi Swasta, Jamkes Perusahaan

Untuk mengukur penetrasi asuransi kesehatan, dilakukan perhitungan **Jumlah Pemilik BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Jamkesda Penduduk Berpenghasilan Rendah dibandingkan Jumlah Penduduk Berpenghasilan Rendah**; sementara untuk BPJS non PBI dan Jamkesda diukur dengan **Jumlah Pemilik BPJS mandiri, Asuransi Swasta, Jamkes Perusahaan Penduduk Non Berpenghasilan Rendah dibandingkan Jumlah Penduduk Non Berpenghasilan Rendah**.

4. Availability/Ketersediaan

- a. Dalam UN SDGs 8.10 terkait dengan peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan, salah satu indikator demografis yang digunakan adalah **Ketersediaan ATM per 100.000 Penduduk Dewasa** (Sarma, 2024).
- b. Selain itu, **Ketersediaan Agen Bank/Branchless Banking Agent (Agen Laku Pandai) per 100.000 Penduduk Dewasa** digunakan sebagai salah satu indikator (Ravikumar, 2020). Agen Laku Pandai merupakan terobosan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan di tengah tantangan keterbatasan lembaga keuangan formal (dalam hal ini adalah bank) untuk menjangkau masyarakat terutama di daerah rural dan 3T. Laku Pandai dapat mendorong jangkauan layanan keuangan hingga ke perdesaan

- dan masyarakat *unbanked* melalui keberadaan agen sehingga dapat mengatasi kendala geografis (Koesmahargayo, Wahyudi, & Chalid, 2024; Dawood et al., 2019) yang dihadapi oleh bank sehingga menjadi lebih efisien (Muthia et al., 2019). Agen bank juga mendorong pendalaman keuangan dan pembangunan (Nisha, Nawrin, & Bushra, 2020) dan juga mendorong penggunaan layanan keuangan, terutama untuk golongan masyarakat rentan (Nagaaba et al., 2025).
- c. Meningkatnya adopsi ponsel pintar di setiap kalangan masyarakat berpotensi mendorong inklusi keuangan berbasis digital, salah satunya adalah metode pembayaran berbasis Quick Response (QR) Code. QRIS (QR Code Indonesian Standard) mendorong peningkatan transaksi digital, mudah digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan (Nandru & Chendragiri, 2024), mendorong inklusi keuangan digital serta meningkatkan stabilitas keuangan (Sumaylo et al., 2022). Sebagai salah satu unsur pendukung inklusi keuangan, World Bank dalam Global Payment System Survey (GPSS) mengkategorisasikan *Merchant* yang Menerima Pembayaran Menggunakan Metode QR Code dalam 100,000 Penduduk Dewasa sebagai indikator untuk ekosistem pembayaran retail. Salah satu bentuk adopsi pengaplikasian indikator tersebut di Indonesia adalah **Ketersediaan QRIS Merchant per 100.000 Penduduk Dewasa**.

5. Kedalaman Keuangan (*Financial Deepening*)

Financial deepening, atau kedalaman keuangan, merujuk kepada ekspansi/perluasan produk/jenis layanan keuangan keuangan dan volume uang beredar di masyarakat (Mirdala,

2011; Nousheen Tariq Bhutta & Avvisati, 2021). Beberapa studi menyimpulkan bahwa pendalaman keuangan memiliki dampak dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan dampak positif pada jangka panjang (Mirdala, 2011; Darrat, Elkhal & MacCallum, 2006; Shapoval & Shpanel-Yukhta, 2020; Manasseh et al., 2024). Adapun indikator yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu indikator penting bagi kedalaman keuangan, yaitu Rasio simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan PDB menggambarkan kestabilan keuangan suatu negara (dalam hal ini negara dengan keterbukaan ekonomi yang kecil) (Chukwunweke Ehiedu et al., 2020). Dalam konteks lokal, hal tersebut dapat diterjemahkan dalam **Rasio DPK (Bank dan BPR/S) dengan PDRB** sebagai salah satu indikator untuk melihat bagaimana tingkat kedalaman keuangan di tingkat daerah.
- b. Selain DPK, kedalaman keuangan juga diukur melalui penyaluran kredit/pinjaman kepada pihak swasta terutama UMKM yang memiliki dampak vital dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan inovasi, termasuk peran mereka dalam PDB dan ekspor di beberapa negara (Begum et al., 2024; Thangavel & Hariharan, 2015) dan kerap kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kredit/pembiayaan (Begum et al., 2024; Thangavel & Hariharan, 2015; Mahlawat & Batra, 2020). Dukungan kepada UMKM agar memiliki akses terhadap layanan keuangan, terutama kredit/pembiayaan, mengindikasikan bahwa fasilitasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka semakin besar sehingga **Rasio Total Pinjaman UMKM dengan Total Pinjaman** dapat digunakan sebagai salah satu indikator kedalaman keuangan (Kanga et al., 2024; Adhikary et al., 2021).

LAMPIRAN 4. Komparasi Indikator Inklusi Keuangan

| No. | Indikator | G20/ Lembaga Lain | Malaysia | Filipina | Thailand | India | Lainnya |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|---------|
| Kepemilikan/Penggunaan Akun/Rekening (Account Ownership) | | | | | | | |
| 1. | Kepemilikan Akun/ Rekening | Adults with an account: Account (% age 15+) (WB) | Percentage of adults who report having an account at a bank (UNCDF) | <ul style="list-style-type: none"> Percentage of adults with transaction accounts Gap in account ownership Income class: ABC vs. E | Percentage of Thai household using financial services | | |
| 2. | Kepemilikan rekening tabungan | Number of Account: <ul style="list-style-type: none"> Deposit accounts per 1,000 adults (IMF) Saved at a financial institution (% age 15+) (WB) | <ul style="list-style-type: none"> No. of deposit accounts Adults with deposit accounts (%) No. of deposit accounts per 10,000 adults (ownership) Adults with active deposit account (%) (usage) | <ul style="list-style-type: none"> Financial health index: number of accounts (banks, NSSLAs, cooperatives, EMIs) with at least PHP 10,000 Percentage of adults with savings in formal financial institutions | Access to deposits/savings service | <ul style="list-style-type: none"> Percentage of adults with a savings bank account Percentage of women having a savings bank account | |
| 3. | Kepemilikan e-wallet | <ul style="list-style-type: none"> E-money accounts per 1,000 adults (WB GPSS) Mobile money transactions per 100,000 adults (IMF) | <ul style="list-style-type: none"> Number of e-money accounts (banks and non-banks; millions/10,000 adults) Number of active e-money accounts (millions/10,000 adults) Number of inactive e-money account (millions/10,000 adults) (UNCDF) | <ul style="list-style-type: none"> Percentage of internet/mobile phone users who use DFS. Lead indicator: number of registered online or mobile banking users Gap in use of DFS. Income class: ABC vs. E | | | |

| No. | Indikator | G20/ Lembaga Lain | Malaysia | Filipina | Thailand | India | Lainnya |
|-----|------------------------|---|---|--|---|--|---------|
| 4. | Akun pinjaman UMKM | <ul style="list-style-type: none"> SMEs with an outstanding loan or line of credit (%) (WB ES) SME loan accounts (as a % of non-financial corporation borrowers) (IMF) Credit Barrier: Percentage of SMEs required to provide collateral on their last bank loan (reflects the tightness of credit conditions) (WB Enterprise Surveys and OECD SME Scoreboard) | | <ul style="list-style-type: none"> Gap in access to formal credit Men- vs. women- owned/ led SMEs Percentage of i) MSMEs and ii) smallholder farmers with outstanding loan or line of credit in a formal financial institution Percentage of women-owned MSMEs with outstanding loan or line of credit in a formal financial institution Percentage share of i) MSME loans and ii) agriculture loans with loan guarantee/surety to total MSME/ agriculture loans Percentage share of secured SME bank loans to total SME bank loans outstanding | | <ul style="list-style-type: none"> Percentage of MSMEs having access to bank credit Percentage of SMF having access to bank credit (Agricultural sector) | |
| 6. | Akun Pinjaman Individu | <ul style="list-style-type: none"> Adults with credit at regulated institutions: <ul style="list-style-type: none"> Borrowed from a financial institution in the past year (% age 15+) (WB) Outstanding loans per 1,000 adults (IMF) | <ul style="list-style-type: none"> Adults with financing/loan accounts (%) No. of loan accounts per 10,000 adults | Percentage of borrowers who obtained their loan from formal sources | Access to loan service (excluding credit cards) | <ul style="list-style-type: none"> Percentage of Adults having credit product from banks Percentage of women with a formal credit product | |

| No. | Indikator | G20/ Lembaga Lain | Malaysia | Filipina | Thailand | India | Lainnya |
|------------------------------------|--|---|---|---|----------|--|---------|
| 7. | Akun Asuransi | Adults with insurance: <ul style="list-style-type: none"> Insurance policy holders per 1,000 adults | Adults with life insurance / takaful policies (%) | <ul style="list-style-type: none"> Gap in ownership of insurance policies, Income class: ABC vs. E Number of microinsurance policy owners including dependents (in millions) Number of lives covered (in millions) Percentage of i) MSMEs and ii) smallholder farmers and fisherfolk with insurance | | <ul style="list-style-type: none"> Percentage of adults having life insurance product Percentage of adults having non-life insurance product Percentage of women having life insurance product Percentage of women having non-life insurance product | |
| Ketersediaan (Availability) | | | | | | | |
| 8. | Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa | ATMs per 100,000 adults (IMF) | <ul style="list-style-type: none"> No. of ATMs per 10,000 adults No. of CDMs per 10,000 adults No. of POS Terminal (ATM & CDM) per 10,000 adults | | | No. of ATMs per 100,000 adults (and per 1000 sq km) | |
| 9. | Rasio Jumlah Agen Bank per 100.000 penduduk dewasa | <ul style="list-style-type: none"> Agents of payment service providers per 100,000 adults (WB GFSS) Mobile agent outlets per 100,000 adults (IMF) POS terminals per 100,000 adults (WB GFSS) | <ul style="list-style-type: none"> No. of Financial Access Points (FAPs) per 10,000 adults (Bank branches and agent banks) No. of agent banks Sub-districts with financial access points (%) | | | No. of Business Correspondents per 100000 Adults (and per 1000 sq km) | |
| 10. | Jumlah QR/PoS Merchant per 100.000 penduduk dewasa | SMEs that have a POS terminal (%) (WB ES) | | Percentage of MSMEs with digital payment capabilities *Lead indicator: number of merchant accounts (EMI and bank) | | No. of PoS Machines per 100000 Adults (and per 1000 sq km) | |

| No. | Indikator | G20/ Lembaga Lain | Malaysia | Filipina | Thailand | India | Lainnya |
|---------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|---------|
| Kedalaman Keuangan | | | | | | | |
| 11. | Nominal Dana Pihak Ketiga dengan PDRB | World Bank (Gross Saving, % of GDP), digunakan sebagai indikator global | | | | | |
| 12. | Nominal Pinjaman UMKM dengan Total Pinjaman | G20, IMF | | | | | |



Informasi komprehensif dan dokumentasi terkait IKAD tersedia melalui pemindaian kode QR terlampir atau tautan daring berikut:
www.ikad-inklusi.org